

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU MACCA
DI KABUPATEN SOPPENG**

Disusun dan Diusulkan oleh :

IRMA PUTRI SURIADI

Nomor Stambuk :105610517414



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2019**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU MACCA
DI KABUPATEN SOPPENG**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diusulkan Oleh

IRMA PUTRI SURIADI

Nomor stambuk : 105610517414

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2019

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Program Kartu Macca di
Kabupaten Soppeng
Nama Mahasiswa : Irma Putri Suriadi
Nomor Stambuk : 105610517414
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Jaelan Usman, M.Si

Pembimbing II



Dr. Abdi, M.Pd

Mengetahui:

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara



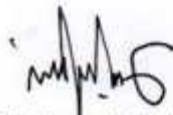
Narul Haq, S.Sos, M.PA

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM penguji skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/ undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0034/FSP/A.1-VIII/1/40/2019, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Administrasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019.

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si (ketua)
2. Dr. Abdi, M.Pd
3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
4. Haerana, S.Sos, M.Pd



HALAMAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Irma Putri Suriadi

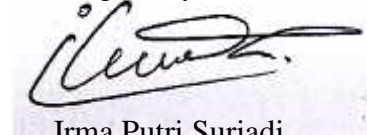
Nomor Stambuk : 10561 05174 14

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar 2018

Yang Menyatakan,



Irma Putri Suriadi

ABSTAK

IRMA PUTRI SURIADI. Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng (dibimbing oleh Jaelan Usman dan Abdi)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng. Bagaimana ketepatan program Kartu Macca dalam mencapai tujuan program yaitu untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat tergolong miskin serta mempermudah Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penyaluran batuan dan subsidi kepada masyarakat kurang mampu, berpendapatan rendah atau masyarakat miskin.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi yang bersifat induktif, analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informan dalam penelitian ini sebanyak 15 orang. Dan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng telah sesuai dengan Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2016, sebagai salah satu visi dan misi Bupati Kabupaten Soppeng namun belum berjalan dengan maksimal dimana dalam Implementasi Program Kartu Macca tidak ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang tidak tahu serta tidak paham dengan program Kartu Macca tersebut dan juga masih ada masyarakat penerima Kartu Macca yang sampai sekarang belum mengambil Kartu Maccanya di kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

Kata Kunci : Implementasi, Program Kartu Macca

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Rabb semesta alam, pemilik langit, bumi dan segala yang ada diantara keduanya. Atas segala limpahan nikmat, kasih sayang hidayah dan petunjuknya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng**”. Salawat serta salam senantiasa tucurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah guru dan teladan yang terbaik bagi umat manusia bukan hanya dalam ibadah juga mendidik generasi-generasi penerusnya sehingga menghasilkan generasi terbaik yaitu para sahabatnya, *bai'in* dan *tabi'ut*, keselamatan bagi mereka semua serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan baik.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu pada kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua saya, ayahanda SURIADI dan ibunda JUMRIANI, yang telah mendukung dan merespon penuh dan telah mencurahkan seluruh kasih sayang dan pengorbanan yang diberikan selama ini hingga saya ke jenjang pendidikan S1, semoga segala pengorbanan beliau memperoleh ridho dan mendapatkan balasan dari Allah SWT.

2. Bapak Dr. Jaelan Usman, M.Si, selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Abdi, M.Pd, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
3. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Nasrulhaq, S.Sos, M.Pa selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selama ini turut membantu dalam kelengkapan berkas hal-hal yang berhubungan administrasi perkuliahan dan kegiatan akademik.
5. Bapak serta Ibu dosen beserta staf FISIPOL Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membantu selama menempuh pendidikan sampai tahap penyelesaian studi.
6. Para pihak Dinas/ instansi yang ada pada lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. Kepada seluruh keluarga besar Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar terutama angkatan 014 Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang dilalui selama perkuliahan.
8. Kepada adikku, sahabat serta teman-temanku terkhusus Suriani Putri Suriadi, Ahmad Nitozi Mansur, Andi Hamriani, Ameliyah Reski, Nur Asia, Widi Safitri yang selalu membantu, memberikan dukungan,

motivasi serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. Seluruh rekan-rekan yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, namun telah memberikan banyak bantuan kepada penulis.

Dengan segala keterbatasan, dan demi kesempurnaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan, semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan hal yang baik.

Makassar, 27 September 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Irma Putri Suriadi', written in a cursive style.

IRMA PUTRI SURIADI

DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Penerimaan Tim.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar.....	xii
Daftar Lampiran	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan	6
B. Konsep Implementasi Kebijakan	9
C. Model Implementasi Kebijakan.....	13
D. Konsep Kartu Macca.....	20
E. Kerangka Pikir	22
F. Fokus Penelitian	23
G. Deskripsi Penelitian	24

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	27
C. Sumber Data.....	28
D. Informan Penelitian.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29

F. Teknik Analisis Data.....	31
G. Teknik Pengabsahan Data.....	32
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	34
B. Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng	49
C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng.....	74
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Daftar Informan Penelitian	29
Tabel 4.1 Daftar Kelurahan dan Kecamatan di Kabupaten Soppeng.....	36
Tabel 4.2 Daftar Pegawai Dinas Sosial	61
Tabel 4.3 Puskesmas yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Proses Implementasi Kebijakan Publik.....	10
Gambar 2.2 Model Van Meter dan Van Horn	14
Gambar 2.3 Model Mazmanian dan Subatier	16
Gambar 2.4 Model Edward III.....	17
Gambar 2.5 Alur Pelayanan Pengambilan Kartu Macca	21
Gambar 2.6 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Soppeng.....	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng	39
Gambar 4.3 Persyaratan Pemberian Benih Ikan Gratis.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran.1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2. Instrumen Penelitian

Lampiran 3. Dokumen Penelitian

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era sekarang ini, kebijakan bukan lagi hal yang lazim bagi masyarakat. Istilah kebijakan sebenarnya telah sering diperdengarkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang sosial, bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan dan masih banyak lagi kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Kebijakan publik merupakan wewenang pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya dalam hubungannya dengan masyarakat dan dunia usaha. Pada dasarnya kebijakan pemerintah dalam menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek merupakan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik. Dalam penyusunan akan kebijakan publik diawali dari perumusan masalah yang telah diidentifikasi kemudian pelaksana kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi masalah yang terjadi dalam masyarakat (Agustiawan, 2014).

Hal yang tidak bisa diabaikan dalam sebuah kebijakan adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari seluruh proses kebijakan. Karena implementasi menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar sesuai dengan di lapangan dan berhasil mencapai *output* dan *outcomes* seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Sehingga berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui setelah diimplementasikan. Dengan kata lain pembuatan kebijakan tidak berakhir setelah kebijakan ditentukan dan di setujui (Haedar, 2010).

Implementasi itu sendiri merupakan lanjutan dari tahap formulasi dalam proses pembuatan kebijakan yang dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan jelas yang berorientasi pada kepentingan publik (masyarakat). Dalam hal ini implementasi dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan yang bertujuan untuk menghantarkan suatu kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut terlaksana seperti yang diharapkan. Rangkaian kebijakan tersebut mencakup persiapan peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Contohnya yaitu sejumlah Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah, Perda dan lain lain muncul dari sebuah undang-undang. Adanya sumber daya, serta siapa yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana cara untuk menghantarkan kebijakan tersebut agar langsung sampai kepada masyarakat atau kelompok sasaran. (Hanif, 2016).

Ada dua langkah pilihan dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu dengan cara melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan tersebut atau dengan cara langsung mengimplementasikan kebijakan tersebut dalam bentuk program. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila program-program telah dibuat, tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, dan dana telah dialokasikan sehingga tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai. (Hanif, 2016).

Sebagai penyelenggara, pemerintahan sangatlah menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu kebijakan yang di buatnya. Butuh pertimbangan dari pihak

penyelenggara pemerintahan dalam pembuatan suatu kebijakan mulai dari proses perumusan, implementasi sampai dengan evaluasi kebijakan. Seperti halnya dengan program Kartu Macca yang merupakan program baru pemerintah kabupaten Soppeng yang telah diimplementasikan sejak bulan Januari tahun 2017. Program ini berdasarkan Perbup Kabupaten Soppeng Nomor 23 tahun 2016 serta dilandasi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan upaya penanganan fakir miskin melalui pendekatan wilayah dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015. Program Kartu Macca ini bertujuan dalam pemberdayaan masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat yang tergolong miskin. Kartu Macca yang hanya berlaku di Kabupaten Soppeng ini dapat digunakan untuk memperoleh bantuan untuk berbagai layanan pendidikan, kesehatan, bantuan hukum dan bulog.

Hasil yang diharapkan dari program Kartu Macca ini agar seluruh masyarakat kurang mampu dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah sehingga terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Namun dalam implementasinya di lapangan menimbulkan beberapa masalah. Seperti terjadinya diskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Masih ada masyarakat yang kurang mengerti tentang program Kartu Macca. Ada beberapa masyarakat yang beranggapan bahwa semua masyarakat bisa mendapatkan Kartu Macca namun, penerimaan Kartu Macca tidak serta merta akan di berikan kepada masyarakat karena harus sesuai dengan data yang di terima dari desa/kelurahan. Dan juga masih kurangnya sosialisai mengakibatkan masyarakat masih bingung dengan alur pelayanan Kartu Macca dikarenakan (Soppengkab.go.id, 2017).

Selain itu pengimplementasian Kartu Macca juga masih mengalami masalah terkait masih terhambatnya disalurkan Kartu Macca kepada masyarakat dikarenakan pihak dinas sosial selaku pelaksana program Kartu Macca tersebut menunggu data valid masyarakat dari desa/ kelurahan sehingga dari 70 desa di kabupaten soppeng baru beberapa desa yang mendapatkan Kartu Macca (BUGISWARTA.com, Soppeng 2017).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “**Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng**” di mana peneliti ingin mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan dan sudah sesuai dengan prosedur dengan menggunakan teori Edward III yang memiliki empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi serta Struktur Birokrasi.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng?
2. Apakah faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin diketahui penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menambah wawasan serta penulis dengan cara mengaplikasikan segala teori yang didapat selama perkuliahan di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dalam pembahasan masalah mengenai Implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng.

2. Praktis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng agar lebih maksimal dalam menerapkan dan mengembangkan program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik memiliki banyak pengertian serta definisi dari masing-masing sudut pandang dari beberapa ahli. Dan istilah kebijakan publik sudah tak lazim lagi di kalangan masyarakat. Baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia akademik. Pengertian “Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kata publik berarti membahas tentang cakupan negara atau pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dapat pula berarti: 1).orang-orang, 2).keseluruhan anggota suatu komunitas, bangsa atau masyarakat, 3).kumpulan individu dengan kepentingan yang sama” (Abdi, 2018:7).

Toha (2011:106-107) terkait kebijakan (*policy*) yang menyimpulkan kebijakan disatu sisi berupa suatu usaha yang kompleks dari publik untuk kepentingan publik, di lain sisi kebijakan adalah cara atau teknik untuk memecahkan konflik dan menimbulkan insentif.

Nugroho (2004:158), menjelaskan yang penting dalam proses pembuatan kebijakan adalah dengan langsung mempraktekkannya dalam bentuk program-program. Kebijakan tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang.

Kebijakan publik menurut Thomas R Dye (Subarsono, 2005:2) “Apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak untuk dilakukan”. Pilihan tersebut merupakan sekumpulan kegiatan yang bermaksud memberikan efek perbaikan terhadap kondisi sosial, ekonomi ,sehingga pilihan tersebut berupa hasil keputusan yang diambil oleh pelaku-pelaku tertentu yang dimaksudkan untuk tujuan publik. Pendapat ini sejalan dengan definisi William Dunn dalam (Suratman,2017:12) yang menyatakan bahwa “ kebijakan merupakan serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan- tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat”. Kebijakan merupakan setiap hubungan antara lembaga pemerintah dengan lingkungannya. Kebijakan tersebut tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pernyataan- pernyataan tertulis, melainkan juga setiap tindakan pemerintah.

Seorang pakar ilmu politik lain, Card Friedrich (Agustino, 2014:7) memberikan penjelasan bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan yang lebih mengarah ketujuan, adanya hambatan dan juga mewujudkan sasaran yang diinginkan. Yang merupakan sasaran utama dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah masyarakat. Kebijakan tersebut dibuat dalam rangka untuk mengatur kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama.

Adapun kebijakan yang dikemukakan oleh Hessel Nogi S. Tangkilisan (2003:2), “Kebijakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung ataupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat”. Ini berarti kebijakan adalah semua

tindakan maupun keputusan yang dilakukan pemerintah yang dimana dimaksudkan untuk memberikan pengaruh atau dampak terhadap masyarakat.

Pendapat yang sama juga dari Marshall dalam bukunya *Implementasi Kebijakan Publik* (2003:21), bahwa: “Kebijakan adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki dampak yang langsung terhadap kesejahteraan warga negara melalui pelayanan sosial atau bantuan keuangan”. Hal tersebut memberikan arti bahwa pemerintah selalu mempunyai kebijakan yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Seperti dengan menyediakan pelayanan sosial serta bantuan keuangan.

Pasolong (2010: 39) mengartikan kebijakan publik ke dalam beberapa poin yaitu:

- a. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah,
- b. Kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik, dan,
- c. Kebijakan publik adalah memilih tindakan yang terbaik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

Holwet dan M. Ramesh (Subarsono, 2005:13) berpendapat bahwa ada lima proses kebijakan publik adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan agenda, yakni suatu proses yang dilakukan guna mendapatkan respon pemerintah agar suatu masalah bisa terselesaikan.
- b. Formulasi kebijakan, yakni proses yang dilakukan guna merumuskan tindakan kebijakan oleh pemerintah.

- c. Pembuatan kebijakan, yakni proses yang dilakukan pemerintah untuk melakukan suatu tindakan maupun tidak melakukan tindakan tersebut.
- d. Implementasi kebijakan, yakni proses yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan agar tujuan dapat tercapai.
- e. Evaluasi kebijakan, yakni proses yang dilakukan untuk memantau dan memberikan penilaian atas hasil kebijakan yang telah dilaksanakan.

Robert Presthus (Santoso, 2008:34) mengatakan bahwa kebijakan, dalam pengertiannya yang paling fundamental, adalah satu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan membenarkan, memedomani, atau mengerangkakan seperangkat tindakan, baik yang nyata maupun tidak. Pada umumnya, kebijakan merupakan satu ketangka, yang darinya kuputusan tertentu dibuat.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

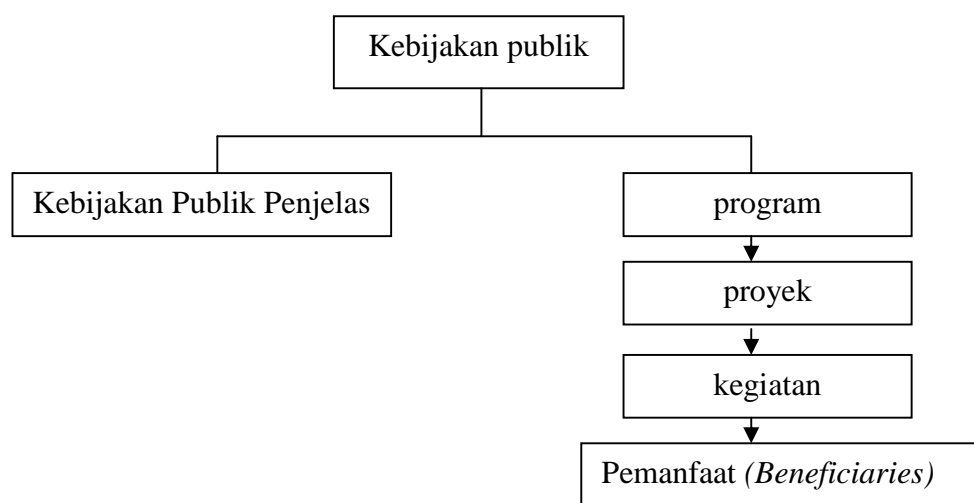
Kamus Webster (Wahab, 2010: 64) merumuskan secara singkat bahwa *to impelement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the meansfor carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give paractical effect to* (memunculkan dampak terhadap sesuatu). Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai sesuatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasa dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah cara agar suatu kebijakan dapat tercapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakn publik, ada dua

cara yang bisa dilakukan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2003: 158).

Gambar 2.1

Proses Implementasi Kebijakan



Sumber: Nurgoro,(2003:159)

Proses implementasi kebijakan seperti pada gambar di atas menjelaskan bahwa kebijakan dioperasionalkan dalam bentuk program. Kemudian program tersebut diturunkan menjadi proyek yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Kegiatan tersebut ditujukan kepada pemanfaat program, yang mana pemanfaat program adalah masyarakat (Nugroho, 2003:159).

Aspek yang paling penting dari keseluruhan proses kebijakan yaitu implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari formulasi kebijakan. Dunn dalam Mustari(2015:136) “Implementasi kebijakan, lebih bersifat kegiatan praktis, termasuk di dalamnya mengeksekusi dan mengarahkan”. Hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan, kepentingan dan

strategi pelaku kebijakan apabila dilihat dari konteks implementasi kebijakan. Dan juga karakteristik lembaga serta rezim, izin pelaksana dan respon terhadap kebijakan.

Sama halnya dengan Jones (Mustari,2015:138), menyatakan bahwa “tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah merupakan aspek penting dari keseluruhan proses lahirnya kebijakan”. Akan tetapi banyak yang beranggapan setelah kebijakan tersebut disahkan maka kebijakan akan dilaksanakan dan hasilnya akan mendekati seperti yang diharapkan. Namun pendapat Putra (2003), mengatakan “sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat *self executing*, yang paling banyak adalah yang bersifat *non self executing*, artinya kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak seperti yang diharapkan”.

Pemahaman lebih lanjut tentang konsep implementasi dapat pula dilihat dari apa yang dikemukakan oleh Agustino (2008 :139), “implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri”. Sedangkan menurut Ripley dan Franklin dalam (Winarno, 2014: 148), menjelaskan tentang implementasi merupakan segala yang terjadi setelah ditetapkannya UU. implementasi mencakup segala kegiatan birokrat agar program dapat berjalan.

Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Wahab, 2010:65), mengatakan bahwa “implementasi adalah mengerti apa yang

sebenarnya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. perhatian implementasi kebijakan yaitu realita yang terjadi dan kegiatan yang timbul setelah diberlakukannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup, baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun memberikan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari pendapat yang diutarakan oleh Van Meter Van Horn (Winarno, 2008:152), menjelaskan bahwa “implementasi merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dari keputusan-keputusan sebelumnya”.

Implementasi kebijakan menurut William N. Dunn (dalam Nugroho, 2003:132) “Implementasi adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu untuk mewujudkan suatu kebijakan yang tidak jelas ke dalam kenyataan yang terjadi”. Jadi implementasi kebijakan adalah sebuah bukti nyata dari kebijakan yang sudah diimplementasikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Dalam buku *Studi Implementasi Kebijakan Publik* (Rulinawaty, 2013), menjelaskan bahwa “implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan perorangan atau sekelompok orang baik dalam lingkup pemerintah maupun swasta untuk mendistribusikan keluaran dari kebijakan yang dilakukan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya kepada kelompok sasaran dalam kurun waktu tertentu dalam rangka melanjutkan usaha perubahan besar maupun kecil yang dihasilkan oleh keputusan- keputusan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul

manakala hasil kebijakan dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu diwujudkan.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu : 1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan 3) adanya hasil kegiatan.

C. Model Implementasi Kebijakan

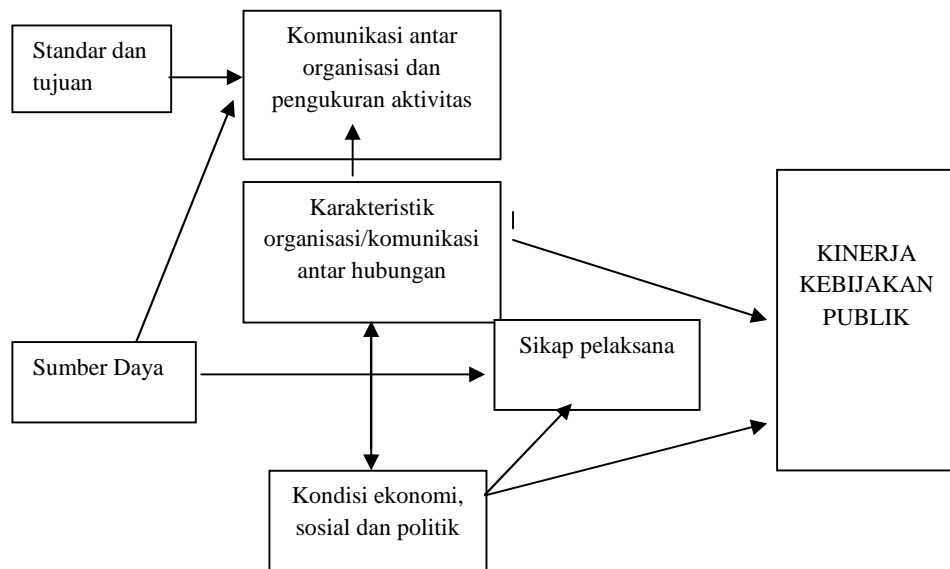
1. Model Van Meter dan Van Horn

Model ini adalah model klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Pada model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator dan kinerja kebijakan publik. Dikemukakan bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijaksanaan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel yang saling berkaitan (Ali, Alam, 2012:110). Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan publik yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan.
2. Sumber daya.
3. Aktivitas implemetasi dan komunikasi antarorganisasi.
4. Karakteristik dari agen pelaksana/ impelementor.
5. Kondisi ekonomi, sosisal dan politik.
6. Kecenderungan dari pelaksana/ implementor.

Gambar.2.2

Model Van Meter dan Van Horn



Sumber: Van Meter dan Van Hort (Nugroho, 2003:168)

2. Model Mazmanian dan Paul Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, dalam (Agustino, 2014:145), ada 3 kategori besar variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan formal pada proses implementasi kebijakan:

1. *The tractability of the problem(s) being addressed*, yaitu muda tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan;
2. *The ability of the statue to structure favorably the implementation process*, yaitu kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
3. *The net effect of a variety of political variables on the balance of support for statutory objectives*, yaitu pengaruh langsung berbagai

variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Mazmanian-Sabetier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel, yaitu:

1. Variabel independen

Mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

2. Variabel intervening

Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan menggunakan indikator kejelasan dan konsisten tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarki diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksanaan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses pelaksanaan yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial-ekonomi dan teknologi, dukungan, publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran, dukungan kewenangan serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

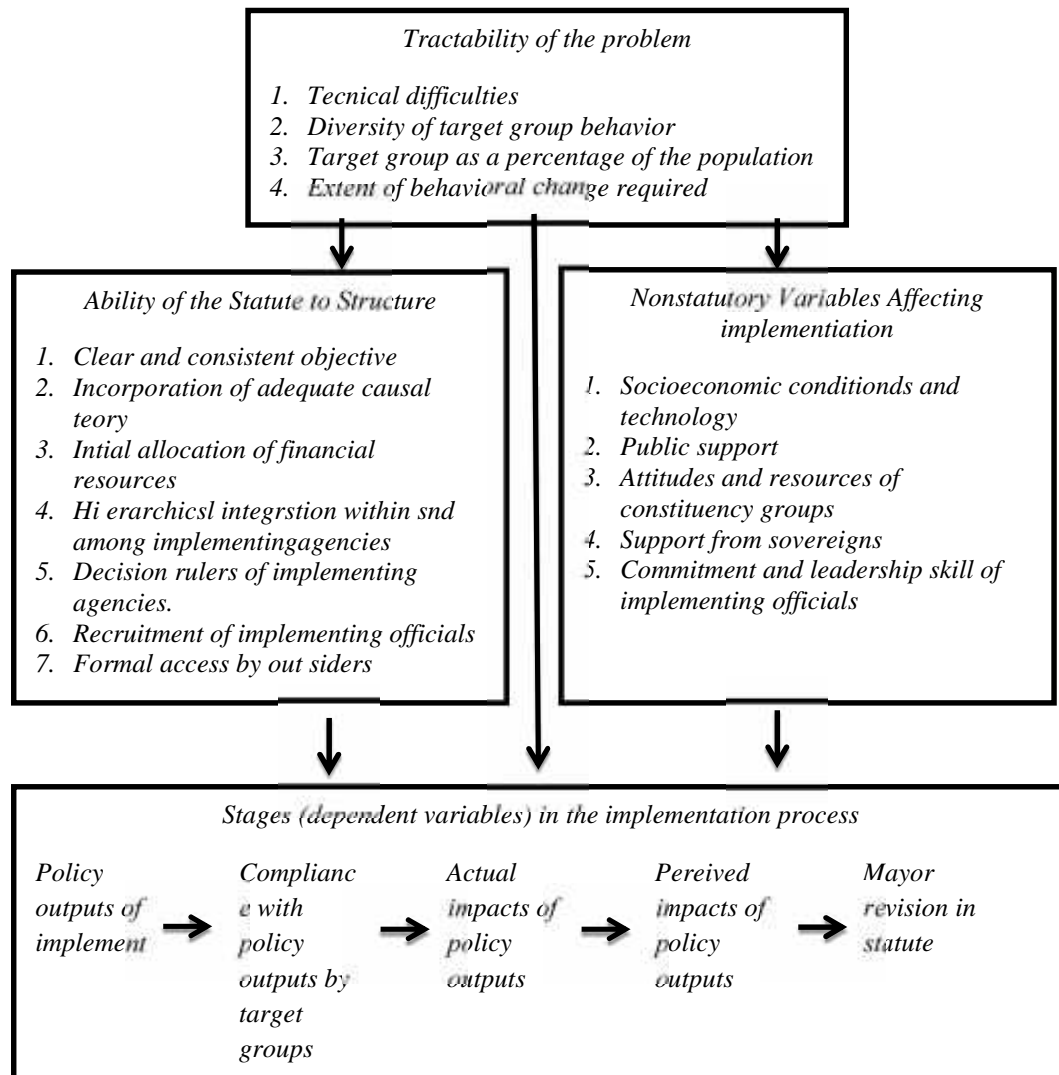
3. Variabel dependen

Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan dengan lima tahapan yaitu, keluaran kebijakan dari organisasi pelaksana, keseusaian

keluaran kelompok sasaran. dampak aktual keluaran kebijakan, persepsi terhadap kebijakan, dan dampak yang diperkirakan perbaikan peraturan.

Gambar.2.3

Model Mazmanian dan Subatier



Sumber: Mazmanian dan Paul Sabatier (Suratman 2017: 101)

3. Model implementasi Edwards III

Model implementasi dari Edwards III (Suratman, 2017:93), menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintahan untuk menjelaskan proses

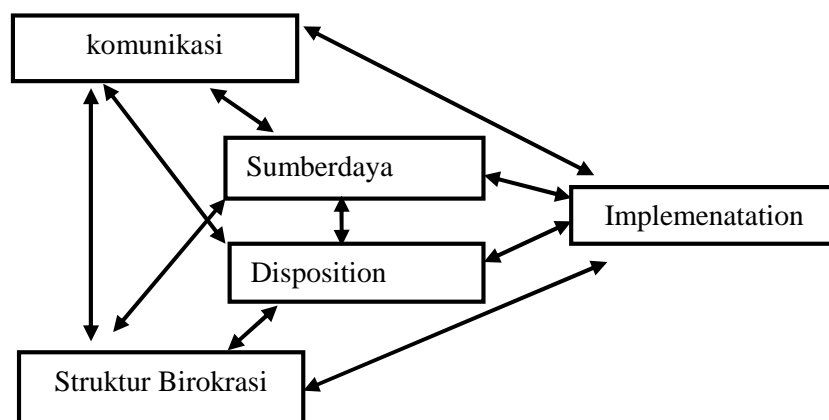
implementasi. Penekanan pada proses ini dilandasi asumsi bahwa kalau para implementor mengikuti sepenuhnya standar pelaksanaan yang telah ditentukan oleh pembuat kebijakan maka dengan sendirinya *output* dan *outcomes* kebijakan yang diinginkan akan tercapai.

Model implemetasi yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Impact on Implementation* (Winarno, 2008). Ada empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implemetasi, yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Gambar.2.4

Model Edward III



Sumber: Edward III (Indiahono, 2017:33)

Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan. Sumber-sumber yang penting meliputi yaitu staf yang memadai serta keahlian yang baik untuk

melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang serta fasilitas–fasilitas yang diperlukan untuk menterjemahkan usul-usul diatas kertas guna melaksanakan pelayanan publik. Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal yang berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Faktor yang keempat adalah struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak, memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern.

4. Model Implementasi Soren C. Winter

Winter memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Model lain yang menarik yang juga termasuk dalam kategori generasi ketiga ini dan dapatkan perhatian dari banyak ahli adalah “*integrated implementation model*” yang dikembangkan oleh Soren C. Winter (Suratman, 2017:142). Mereka melihat implementasi sebagai suatu hal yang tidak berdiri sendiri, mereka memperkenalkan pandangannya sebagai model *integrate*; model *integrate* menunjukkan bahwa sukses implementasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi, yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi ditentukan mulai dari formulasi sampai evaluasi,

yang dengan sendirinya berarti ada keterkaitan antara proses politik dan administrasi.

Selanjutnya Winter mengemukakan tiga variable yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yaitu :

1. Perilaku hubungan antar organisasi. Dengan dimensi yaitu: komitmen dan koordinasi antarorganisasi.
2. Perilaku implementor (aparatur/ birokrat) tingkat bawah. Dengan dimensi yaitu: kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional.
3. Perilaku kelompok. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, jika dampak yang ditimbulkan baik maka kinerja aparat tingkat bawah juga baik demikian juga sebaliknya.

5. Model Hogwood dan Gunn

Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn (Ali, Alam, 2012:109) menjelaskan bahwa dalam mengimplementasi kebijaksanaan negara secara sempurna diperlukan beberapa syarat seperti:

- a. Hal yang akan memunculkan kendala atau gangguan yang serius.
- b. Untuk pelaksana program tersedia waktu dan sumber daya manusia dan sumber daya non manusia yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang dibutuhkan benar-benar tersedia.
- d. Kebijaksanaan yang akan dilaksanakan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.

- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubung.
- f. Hubungan saling merasa ketergantungan harus dikurangi.
- g. kesepakatan dan pemahaman yang dalam harus ditanamkan.
- h. Tugas pokok dan fungsi diperinci dan ditempatkan dalam prosedur yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan bisa menuntut dan mendapatkan keputusan yang sempurna.

D. Konsep Kartu Macca

Program Kartu Macca merupakan Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng yang menjadi kebijakan dan program Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng dalam rangka mengurangi beban masyarakat kurang mampu dalam hal masyarakat yang berpendapatan rendah atau masyarakat miskin. Program ini berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 23 Tahun 2016.

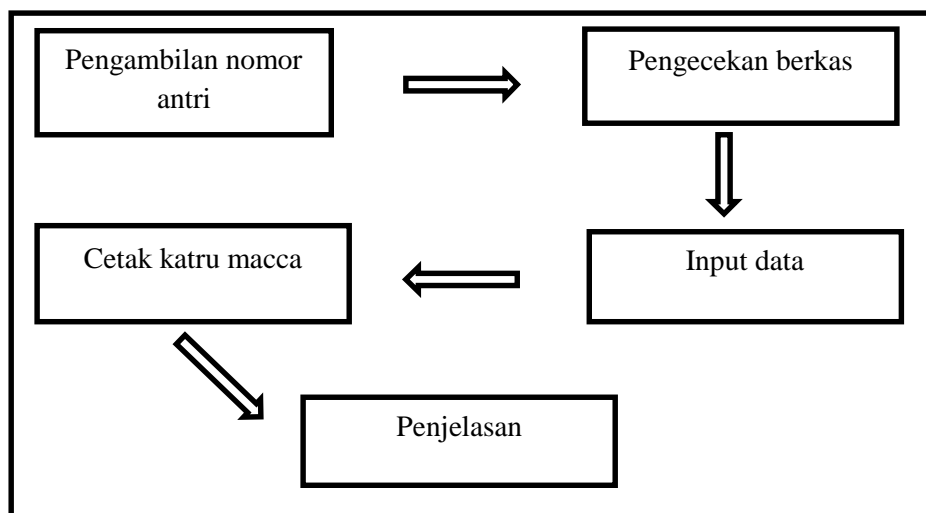
Di Kabupaten Soppeng telah dibentuk Tim Kordinasi Pelaksana Program Kartu Macca. Ini sesuai dengan keputusan Bupati Soppeng No:594/VII/2017 tentang tim koordinasi dan percepatran pelaksanaan program Kartu Macca pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2017. Tiap SKPD yang terkait dalam program Kartu Macca memiliki tim kordinasi pelaksana. Sosial Kabupaten Soppeng untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pembuatan Kartu Macca dan penyaluranya dilakukan di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. Penentuan penerima Kartu Macca berdasarkan hasil

verifikasi desa/ keluarahan yang di rekap di kecamatan untuk selanjutnya diusulkan ke Dinas Sosial sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Adapun alur pelayanan pengambilan Kartu Macca sebagai berikut:

Gambar.2.5

Alur Pelayanan Pengambilan Kartu Macca



Sumber: Dinas sosial Kabupaten Soppeng

Bagi pemegang Kartu Macca dapat digunakan berdasarkan pemanfaatan dari program SKPD terkait yang sarannya pada masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat tergolong miskin dengan data TNP2K dan disinkronkan dengan data hasil munsel/ musdes. Pengguna Kartu Macca menunjukkan Kartu Macca pada instansi terkait untuk mendapatkan bantuan. Misalkan untuk mendapatkan bantuan pendidikan seperti biaya sekolah gratis, tunjukkan Kartu Macca yang dimiliki pada sekolah atau instansi pendidikan terkait.

Kegunaan dan pemanfaatannya sebagai berikut :

1. Bebas biaya kartu keluarga, KTP, akte kelahiran

2. Bebas biaya pendidikan SMU sederajat dan penyediaan beasiswa berprestasi tingkat SD,SMP, SMU Sederajat
3. Bebas biaya kesehatan rujukan lanjut dan persalinan
4. Bebas biaya tebus beras sejahtera
5. Bebas biaya konsultasi bantuan hukum
6. Bebas biaya kesehatan dasar dan persalinan
7. Bebas bibit gratis

E. Kerangka Pikir

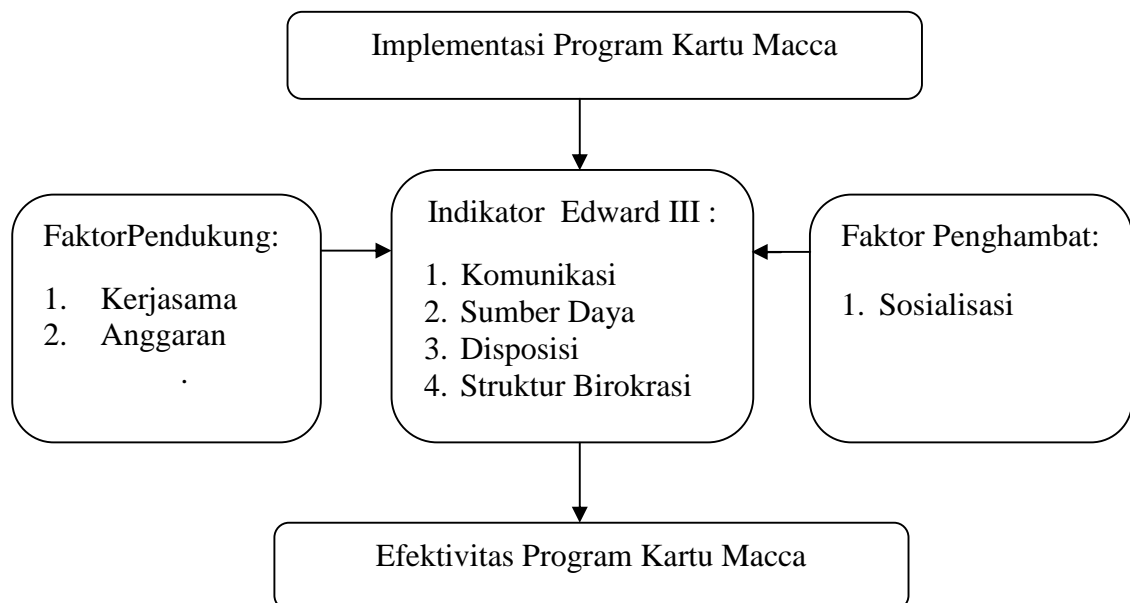
Soppeng merupakan satu satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang menerapkan program Kartu Macca. Kartu Macca merupakan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Soppeng yang menjadi kebijakan dan program pemerintah daerah Kabupaten Soppeng dalam rangka mengurangi beban masyarakat kurang mampu dalam hal masyarakat yang berpendapatan rendah atau masyarakat miskin.

Dalam penelitian mengenai implementasi program Kartu Macca ini, untuk mencari tahu bagaimana implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng serta apa yang menjadi faktor pendukung serta penghambatnya. Penulis mengfokuskan empat indikator dalam implementasi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta organisasi birokrasi dengan menggunakan Teori Edward III.model implementasi Edward III menggunakan faktor yang berfokus di dalam struktur pemerintahan untuk menjelaskan proses implementasi. Dimana menurut George C. Edward III ada empat variabel dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Keempat faktor

tersebut dilaksanakan secara stimultan karena antara satu dengan yang lain memiliki hubungan yang sangat erat. Dalam mengukur komunikasi ada tiga indikator yang dapat digunakan yaitu : a. Transmisi; b. Kejelasan; c. Konsisten. Sumber daya berkenaan dengan sumber daya pendukung seperti: a. Sumber daya manusia; b. Sumber daya finansial. Disposisi berkenaan dengan kepahaman para implementor serta dukungan dari implementor. Kemudian struktur birokrasi membahas badan pelaksana suatu kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi.

Gambar.2.6

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Dari judul penelitian ini yakni Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng, maka penulis memberikan fokus pada penelitian ini proses implementasi program Kartu Macca serta faktor yang mempengaruhi

implementasi program Kartu Macca yakni faktor pendukung serta faktor penghambat dengan melihat model implementasi menurut Edward III yang merupakan indikator dari implementasi kebijakan atau program.

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah implementasi Kebijakan Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng meninjau dari segi:

- a. Indikator implementasi kebijakan menurut Edward III:
 1. Komunikasi. Implementasi akan berjalan dengan baik apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan atau program dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam mencapai tujuan kebijakan atau program.
 2. Sumber Daya. Dalam pengimplementasian suatu program, sumber daya merupakan salah satu hal yang penting. Sumber daya sebagai pendukung jalannya suatu program.
 3. Disposisi. Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu implementasi kebijakan/ program adalah sikap implementor.
 4. Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi membahas badan pelaksana suatu kebijakan yang tidak dapat dilepaskan dari struktur organisasi.
- b. Faktor pendukung dalam implementasi program Kartu Macca.
- c. Faktor penghambat dalam implementasi program Kartu Macca.

G. Deskripsi Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir diatas dapat dikemukakan deskripsi fokus dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu :

- a. Komunikasi dalam penelitian ini melihat bagaimana bentuk, cara serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Soppeng

serta instansi terkait dalam menyampaikan informasi berhubungan dengan implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng baik kepada kelompok sasaran maupun implementor. Dalam mengukur komunikasi, ada dua indikator yang dipakai peneliti yaitu transmisi dan kejelasan informasi. Dalam indikator transmisi bagaimana proses penyampaian informasi program Kartu Macca baik itu kepada pelaksana maupun kepada masyarakat yang mencari kelompok sasaran. Sedangkan pada indikator kejelasan informasi, yang dilihat adalah apakah isi dari program Kartu Macca baik mengenai, manfaat, sasaran, persyaratan tentang program Kartu Macca sudah jelas dan dimengerti oleh implementor serta kelompok sasaran atau belum jelas.

- b. Sumber daya meliputi kemampuan yang dimiliki implementor atau pelaksana program maupun dalam hal pelayanan dan menjadi pendukung proses implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng. Dalam pengukur sumber daya, peneliti menggunakan dua indikator yaitu sumber daya manusia/ staf dan sumber daya finansial atau anggaran. Dalam sumber daya manusia atau staf, yang dilihat adalah apakah sumber daya manusia sudah cukup dalam pelaksanaan program kartu macca serta bagaimana kemampuan yang dimiliki dalam implementasi program Kartu Macca. Sedangkan dalam indikator sumber daya finansial atau anggaran, yang menjadi fokus penelitian peneliti yaitu apakah anggaran yang disiapkan pemerintah Kabupaten Soppeng dalam implementasi program Kartu Macca sudah cukup atau masih kurang.
- c. Disposisi dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua indikator dalam mengukur disposisi yaitu kognisi (pemahaman) dan respon

(dukungan). Pada indikator kognisi peneliti mencari bagaimana pemahaman implementor terkait dengan implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng. Sedangkan dalam indikator respon atau dukungan, peneliti mencari informasi di lapangan mengenai dukungan pelaksana atau implementor dalam implementasi program Kartu Macca di kabupaten Soppeng.

- d. Struktur birokrasi, dalam penelitian mengenai implementasi program Kartu Macca di kabupaten Soppeng, yang ingin diketahui peneliti yaitu prosedur yang mengatur tata dan pola aliran pekerjaan atau mekanisme dalam proses implementasi program Kartu Macca.
- e. Dalam penelitian ini peneliti mencari apa yang menjadi faktor pendukung serta faktor penghambat dalam implementasi program Kartu Macca di kabupaten Soppeng. Baik itu dari pemerintah daerah, dinas yang terkait maupun dari masyarakat atau kelompok sasaran.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu selama dua bulan. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berlokasi di Kabupaten Soppeng tepatnya di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yang tepatnya di Jl. Salo Tungo, Lalabata Rilau, Lalabata, Kabupaten Soppeng. Lokasi ini diambil karena di Dinas Soisal Kabupaten Soppeng Diimplementasikan program Kartu Macca dan ini baru di terapkan sehingga ingin diketahui bagaimana implementasi kebijakan program Kartu Macca.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng secara lebih menyeluruh dan objektif.
2. Tipe penelitian adalah fenomenologi dimaksudkan untuk memberi gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami oleh informan. Adapun masalah-masalah yang diteliti adalah mengenai implementasi program Kartu Macca.

C. Sumber Data

Menurut Sugiyono (2016:225) Ada dua sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian dengan melakukan wawancara dengan informan dan melakukan observasi atau pengamatan

2. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari penelitian kepustakaan, yang diperoleh dari buku teks, laporan, dokumen, baik pada instansi pemerintah, maupun pada perpustakaan yang menyangkut dengan penelitian yang dibahas.

D. Informan Penelitian

Guna mendapatkan data dalam melakukan penelitian maka diperlukan informan yang berkaitan serta memahami permasalahan yang akan diteliti. Dalam suatu penelitian haruslah menggunakan teknik pemilihan informan yang tepat agar dalam pengumpulan data lebih akurat. Dalam penelitian ini peneliti memilih teknik *accidental sampling / convenience* digunakan dengan mempertimbangkan aksesibilitas peneliti dengan informan dalam hal ini pemilihan informan dilakukan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian serta keberadaannya di lokasi penelitian. Teknik pemilihan informan diatas dipilih peneliti agar data yang diperoleh lebih representatif terhadap permasalahan yang terkait penelitian ini. Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini, yakni :

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

NO	NAMA INFORMAN	PEKERJAAN
1	A.Tenri Sessu (ATS)	Sekretaris Daerah
2	Sallang, M.Km, M.Kes (SA)	Kepala Dinas Kesehatan
3	Drs. A. Muh. Surahman, M. Si (AMS)	Kepala Bidang Hukum Sekretariat Soppeng
4	Drs. H. A. Muh. Ilham, MM. (AMI)	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Ir.H. Lukman, M. Si (HL)	Kepala Dinas Pendidikan
6	Ir. H. Suryadi, MH (HS)	Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan
7	Drs. H. Nurdin, M.Si (HN)	Kepala Dinas Sosial
8	Hairuddin, S. Sos (HA)	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin
9	Nurbaya (NB)	Masyarakat
10	Sitti Maryam (SM)	Masyarakat
11	Ambo Dalle (AD)	Masyarakat
12	Sari (SR)	Masyarakat
13	Nurhayati (NH)	Masyarakat
14	Jumarni (JM)	Masyarakat
15	Sadik (SD)	Masyarakat

Sumber: Kantor Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

E. Teknik Pengumpulan Data

Data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Semakin banyak data yang didapat dari suatu penelitian, maka semakin representatif pula penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data menurut Sugiono(2016:224), yang menyatakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian maka sumber data yang digunakan yaitu wawancara, observasi serta dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara mendalam. Apabila dihubungkan dengan penelitian maka observasi dapat diartikan sebagai salah satu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap sesuatu, baik benda, perilaku, maupun kondisi dari berbagai gejala yang akan diteliti. Observasi dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian yang dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Soppeng serta Dinas-dinas yang terkait dalam program Kartu Macca. Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan serta mencatat fenomena-fenomena yang berkaitan dengan permasalahan.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan cara tatap muka dan berdialog langsung dengan informan. Agar dapat mendapatkan data dan informasi yang akurat dan objektif, maka peneliti menggunakan teknik wawancara terbuka. Artinya informan yang diwawancarai diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjawab pertanyaan yang dilakukan oleh peneliti dan selanjutnya akan mencatat semua jawaban yang diberikan oleh informan.

3. Dokumentasi

Peneliti juga memakai teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Hal ini bertujuan sebagai pelengkap dari penggunaan metode observasi, dan wawancara yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Pengumpulan

data-data ini melalui buku-buku, jurnal, laporan, serta tulisan ilmiah yang memiliki kaitan terhadap masalah implementasi program Kartu Macca

F. Teknik Analisis Data

Agar dapat menjelaskan permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Proses analisis data penelitian ini dilakukan secara terus menerus, bersamaan, dengan pengumpulan data yang telah dilakukan. Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan tersebut diantaranya adalah:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara terhadap *key informan* yang *compatible* terhadap penelitian, kemudian observasi langsung kelapangan untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar mendapatkan sumber data yang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Reduksi data, reduksi data ialah teknik menganalisis data dengan cara merangkum, memilih hal yang bersifat pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas data yang diperoleh dari lokasi yakni Dinas Sosial Kabupaten Soppeng serta dinas yang terkait dengan implementasi program Kartu Macca dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencari jika diperlukan.
3. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan selanjutnya. Bentuk penyajian data antara lain berupa teks naratif, matrik,

grafik, maupun bagan. Namun, pada penelitian ini, bentuk penyajian data lebih merujuk pada penyajian deskriptif atau naratif.

4. Teknik analisis data yang terakhir ialah penarikan kesimpulan. Semua data yang telah direduksi, digambarkan lagi secara rinci agar mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Data yang dirincikan ini adalah data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulann data, baik berupa observasi, angket, wawancara, maupun dokumentasi.

G. Teknik Pengabsahan Data

Sugiyono (2016:241), mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan untuk data. Menurut William Wiersma dalam Sugiyono (2007:372) pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara sehingga trigulasi dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Penelitian ini maksudnya melakukan triangulasi sumber dengan cara mencari informasi dari sumber lain atas informasi yang didapatkan dari informasi sebelumnya.

2. Triangulasi Metode

Agar dapat menguji akuratnya sebuah data maka peneliti menggunakan triangulasi metode dengan menggunakan tekhnik tertentu yang berbeda dengan tekhnik yang digunakan sebelumnya namun cara mengecek data sember yang sama.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu berkenaan dengan waktu pengambilan data pada saat penelitian. Yaitu melakukan wawancara dengan waktu yang berbeda, seperti melakukan wawancara di pagi hari dan siang hari dengan pertanyaan yang sama.

Soppeng merupakan salah satu Kabupaten dari 24 Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di WatanSoppeng. Berada pada 4°6'00'' hingga 4°32'00'' Lintang Selatan dan 119°47'18'' hingga 120°06'13'' Bujur Timur. Wilayah Soppeng memiliki luas sekitar 1.500 km² dengan ketinggian antara 5 hingga 1500 meter dari permukaan laut. Kabupaten Soppeng tidak memiliki daerah pesisir, sekitar 77% dari total desa/ kelurahan di Soppeng bertopografi dataran.

Luas Wilayah Kabupaten Soppeng 1.500 km² dengan batas-batas wilayah

-) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang.
-) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo
-) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bone
-) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Barru

Kabupaten Soppeng dilalui beberapa sungai sebagai sumber yang berpotensi dimanfaatkan sebagai pengairan yaitu sungai langkemme, sungai Soppeng, sungai lawo, sungai paddangeng dan sungai lajaroko.

Wilayah Soppeng terbagi menjadi 8 kecamatan, meliputi Kecamatan Marioriwawo, Lalabata, Liliraja, Ganra, Citta, Lilirilau, Donri-Donri, dan Marioriawa. Marioriawa menjadi kecamatan terluas, dengan luas wilayah sebesar 320 km² atau sekitar 21,3 persen dari total luas Kabupaten Soppeng. Sedangkan Citta merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil, yaitu hanya 40 km² atau 2,7 persen dari total luas Kabupaten Soppeng.

Soppeng memiliki jarak yang relatif terjangkau dari pusat Kabupaten. Jarak dari kecamatan menuju ibukota Kabupaten berkisar antara 0 km hingga 35

km. Dengan jarak dari ibukota Kabupaten sebesar 35 km, kecamatan Citta menjadi kecamatan terjauh dari ibukota Soppeng. Sedangkan Lalabata yang beribukota di WatanSoppeng adalah kecamatan terdekat, sekaligus menjadi ibukota Kabupaten serta pusat pemerintahan dan perekonomian di wilayah Soppeng.

Tabel 4.1

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Soppeng

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kelurahan	Desa
1	2	3	4	5
2	Citta	Watan Sitta		Citta, Kampiri, Labae, Tinco
3	Donri-Donri	Tajuncu		Donri-Donri, Kessing, Labokong, Lalabata Riaja, Leworeng
4	Ganra	Ganra		Belo, Enrekeng, Ganra, Lompulle
5	Lalabata	Watan Soppeng	Bila, Botto, Lalabata Rilau, Lapajung, Lemba, Ompo, Salokaraja	Maccile, Mattabulu, Umpungeng
6	Liliriaja	Cangadi	Appanang, Jennae	Galing, Barang, Pattojo, Gading, Timusu, Jampu, Rompe
7	Lilirilau	Cabenge	Cabenge, Macanre, Pajalesang, Ujung	Abbanuange, Baringeng, Kebo, Masing, Palangiseng, Parenring, Paroto, Tetewatu
8	Marioriawa	Batu-Batu	Attang Salo, Batu-Batu, Kaca, Limpomajang, Manorang Salo	Bulue, Laringgi, Panincong, Patampanua, Tellu Limpoe

1	2	3	4	5
9	Marioriwawo	Labessi, Tettikenra rae	Takalala	Barae, Congko, Gattareng, Gattareng Toa,Goarie,Marioriaja ,Mariorilau,Mariorite ngnga, Soga, Watu, Watu Toa

Sumber: Website Kabupaten Soppeng

1. Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

Adapun visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yaitu:

a. Visi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng :

Dinas Sosial Kabupaten Soppeng adalah merupakan pandangan yang jauh kedepan, karena visi inilah yang akan memberikan gambaran secara jelas kemana dan bagaimana Dinas Sosial harus berbuat dan berkarya agar supaya konsis0ten dan dapat eksis, antipatif, inovatif serta produktif dalam memberikan layanan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial anggota keluarganya, Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Soppeng merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab

Bahwa setiap orang adalah Individu yang memiliki harkat dan martabat, memiliki hak menentukan diri sendiri, namun setiap orang juga memiliki tanggung jawab sosial dalam hubungannya dengan orang lain dan diarahkan menjadi orang yang tanggap terhadap kehidupan sosial di lingkungannya.

b. Masyarakat Sejahtera

Menggambarkan suatu kondisi sosial masyarakat yang terpenuhi hak-hak dasarnya berupa kebutuhan jasmani, rohani dan sosial.

b. Misi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng :

Meningkatkan partisipasi sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan sosial yang ditandai dengan semangat nilai kesetiakawanan sosial.

- a. Mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan sosial sebagai investasi sosial.
- b. Memperkuat ketahanan sosial dengan upaya memperkecil kesenjangan sosial dengan memberikan perhatian yang serius kepada masyarakat yang belum beruntung.
- c. Mengembangkan sistim jaminan sosial dan perlindungan sosial.
- d. Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan tenaga sosial masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas.
- e. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

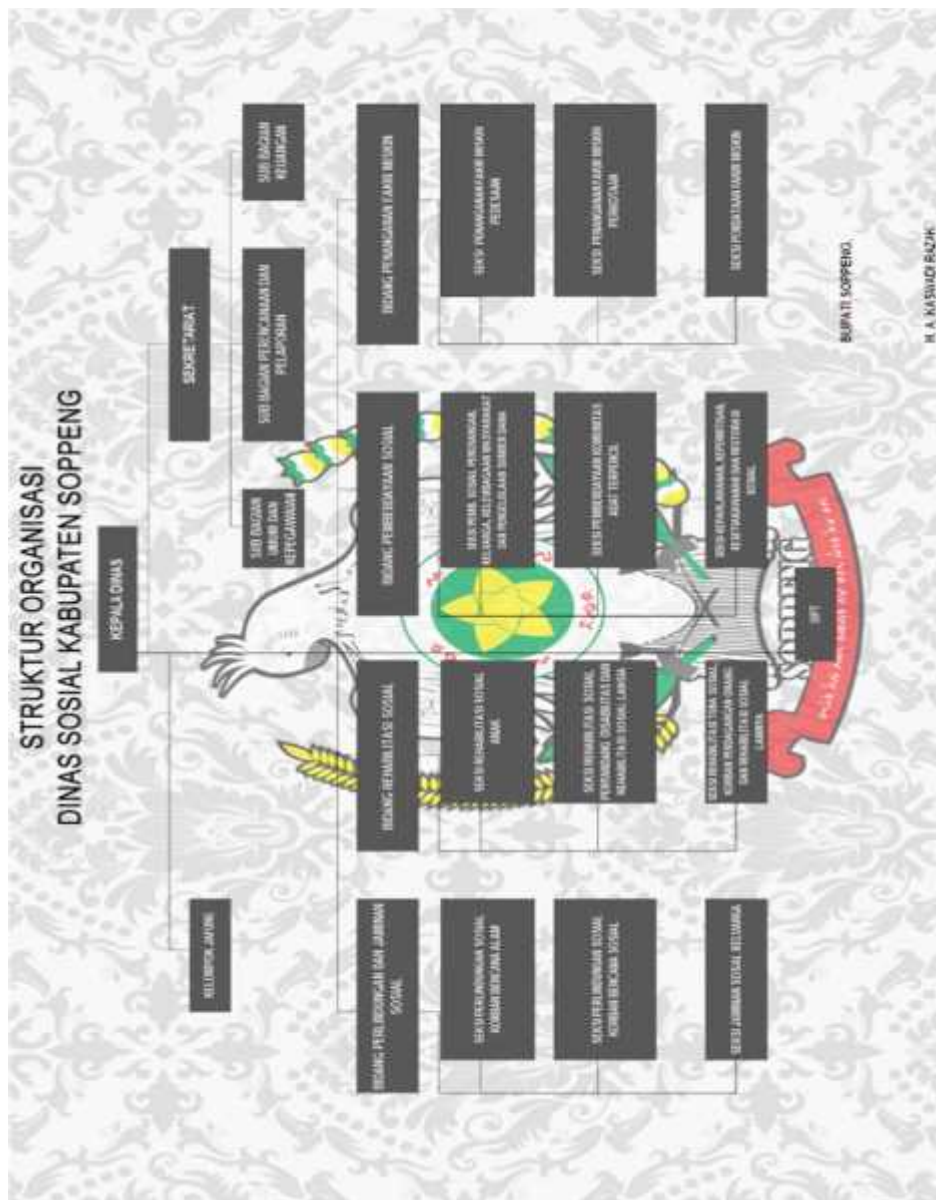
2. Strukur organisasi

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktifitas

dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa, jadi ada suatu pertanggung jawaban apa yang akan dikerjakan.

Gambar.4.2

Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Soppeng



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

3. Tugas dan wewenang

a. Kepala Dinas

Dinas Sosial Kabupaten Soppeng mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas pokok sesuai kebijakan walikota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, merumuskan kebijaksanaan, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas-tugas dinas. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
2. Perencanaan program di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang meliputi perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
3. Pembinaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
4. Pengendalian dan pengamanan teknis oprerasional di bidang perlindungan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.
5. Melakukan pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pemberian, pelayanan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkup Dinas Sosial Kabuipaten Soppeng.

1. Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan

Bagian Perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta mengevaluasi semua pengadaan barang.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumah tanggaan dinas.

3. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana kerja, melaksanakan tugas teknis keuangan.

4. Bidang Perlindungan Jaminan Kesehatan

Bidang perlindungan jaminan kesehatan memiliki tugas melakukan kegiatan perlindungan sosial bencana alam, perlindungan sosial bencana sosial serta jaminan sosial keluarga.

5. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan rehabilitasi sosial terhadap anak, tuna sosial, korban perdagangan orang, disabilitas dan lansia.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat

dan pengembangan sumber dana, melakukan pemberdayaan komunitas adat terpencil, serta melakukan pemberdayaan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, serta restorasi sosial.

7. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang penanganan fakir miskin memiliki tugas melaksanakan kegiatan melakukan kegiatan penanganan fakir miskin pedesaan, penanganan fakir miskin perkotaan serta melakukan pendataan fakir miskin.

4. Wewenang Dinas Sosial

Kewenangan Dinas Sosial diantaranya:

- a. Perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial wilayah Kabupaten/kota dan pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Penyuluhan dan bimbingan sosial
- c. Pembinaan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kejuangan Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia terlantar (dalam dan luar panti)
- d. Pelayanan kesejahteraan sosial anak balita melalui penitipan anak dan adopsi lingkup Kabupaten/ kota
- e. Pelayanan anak terlantar, anak cacat dan anak nakal (dalam dan luar panti)
- f. Pelayanan dan rehabilitasi sosial penderita cacat
- g. Pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial (tuna susila, gelandangan, pengemis, dan eks narapidana)

- h. Pemberdayaan keluarga fakir miskin meliputi fakir miskin, komunitas adat terpencil dan wanita rawan sosial ekonomi
- i. Pemberdayaan karang taruna/ organisasi kepemudaan
- j. Pemberdayaan organisasi sosial/ LSM lingkup Kabupaten / kota
- k. Pemberdayaan tenaga kerja sosial masyarakat
- l. Pemberdayaan dunia usaha(partisipasi dalam usaha kesejahteraan sosial)
- m. Pemberdayaan pengumpulan sumbangan sosial lingkup Kabupaten/kota
- n. Penanggulangan korban bencana alam lingkup Kabupaten/kota
- o. Penanggulangan korban tindak kekerasan (anak, wanita dan lanjut usia)
- p. Penanggulangan korban napza
- q. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga
- r. Pelayanan kesejahteraan angkatan kerja
- s. Penelitian dan uji coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/kota. Penyelenggaraan sistem informasi kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/kota.
- t. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang usaha kesejahteraan sosial lingkup Kabupaten/kota
- u. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan usaha kesejahteraan
- v. sosial lingkup Kabupaten / kota

- w. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

1. Program Kartu Macca

Program Kartu Macca asal mulanya yaitu Bupati terpilih H.A. Kaswadi Razak, SE dan Wakil Bupati terpilih Supriansyah, SH. MH mencetuskan bahwa dalam rangka memberdayakan masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat tergolong miskin, karena menganggap selama belum ini Program Pemerintah belum maksimal tersalurkan dan terarah kepada keluarga kurang mampu, berpendapatan rendah atau masyarakat yang tergolong miskin di wilayah Kabupaten Soppeng.

Olehnya itu Program Kartu Macca merupakan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2016-2021 menjadi program pemerintah Kabupaten Soppeng. Adapun dasar hukum pelaksanaan Kartu Macca sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Sulawesi
2. Undang- undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015
4. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah

5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2016 tentang anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2017
6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 23 Tahun 2016 tentang mekanisme pelaksanaan Kartu Macca
7. Keputusan Bupati Soppeng Nomor 594/VII/2017 tentang Tim Koordinasi dan Percepatan Pelaksanaan Program Kartu Macca Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2017

a. Manfaat Kartu Macca

Manfaat bagi pemegang dan pengguna Kartu Macca sebagaimana program yang ada pada SKPD yaitu:

1. Bebas biaya kesehatan dasar dan persalinan pada Dinas Kesehatan dalam hal ini di masing- masing puskesmas di Wilayah Kabupaten Soppeng
2. Bebas biaya pendidikan sampai SMU sederajat dan penyediaan beasiswa bagi siswa yang berprestasi berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
3. Bebas biaya administrasi kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng
4. Bebas Tebus Rastra, pendataannya di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
5. Bibit benih gratis berada di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Soppeng

6. Bebas biaya konsultasi dan bantuan hukum di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng

b. Persyaratan Penerima Kartu Macca

Persyaratan penerima Kartu Macca adalah masyarakat miskin yang tergolong Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang saat ini mendapatkan Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai berikut:

- a. Penerima Program Beras Miskin (RASKIN)
- b. Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- d. Penerima Kartu Penerima Bantuan Iuran (PBI)
- e. Atau masyarakat kurang mampu yang memiliki surat keterangan kurang mampu dari Desa/Lurah

c. Verifikasi Data Penerima

Penentuan penerima Kartu Macca berdasarkan dari hasil verifikasi desa/kelurahan yang direkap di Kecamatan untuk selanjutnya diusulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Soppeng untuk proses lebih lanjut sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Sasaran penerima Kartu Macca yang telah melalui proses verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng.

Verifikasi data penerima Kartu Macca dilakukan setiap enam bulan sekali melalui usulan data dari Desa/ Kelurahan berdasarkan hasil musyawarah Desa/Kelurahan. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pendataan dan pelaksanaan program Kartu Macca.

d. Susuana struktur tim koordinasi dan percepatan pelaksanaan program

Kartu Macca Pemerintah Kabupaten Soppeng tahun 2017:

- I. Penanggung Jawab : Bupati Soppeng
- II. Wakil Penanggung Jawab : Wakil Bupati Soppeng
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kab.Soppeng
- IV. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian,
Pembangunan Dan Kesra Setda
Kab. Soppeng
- V. Sekretaris : Kepala
- VI. Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Penanganan Fakir
Miskin Dinas Sosial Kab.
Soppeng
- VII. Bidang :

a. Bidang perencanaan

- 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng
- 2. Kasubag Program Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
- 3. Kasi Pendataan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

b. Bidang sosialisasi dan perundang-undangan

- 1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Soppeng
- 2. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Soppeng
- 3. Kasubag Perundang-Undangan Dan Dokumentasi Hukum Dasar Setda Kabupaten Soppeng

c. Bidang Pelayanan

- 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng
 3. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng
 5. Kepala Dinas Perikanan Dan Ketahan Pangan Kabupaten Soppeng
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Latemmamala Kabupaten Soppeng
 7. Kepala Bagian Hukum Dan Perundang-Undangan Setda Kabupaten Soppeng
- d. Bidang Operasional/ Pelaksana
1. Kepala Bidang Penaungan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
 2. Koordinasi Operator/ Pelayanan Kartu Macca
 3. Operator Pengimputan/ Pencetakan Kartu Macca
 4. Pelayanan Kartu Macca
 5. Coocentral
- e. Bidang Pemantauan/ Monitoring Dan Evaluasi
1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng
 2. Kepala Badan Pengelolahan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng
 3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Soppeng

4. Sekertaris Dinas Sosial Kabupaten Soppeng
 5. Kepala Bidang Sosial Budaya Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Soppeng
- f. Bidang Pembinaan
1. Nurmal Idrus, Se. Msi (Tenaga Ahli Bupati Soppeng)
 2. Asrar, S. Kom (Tenaga Ahli Bupati Soppeng)
 3. Alfian Saputra. K
 4. Syamsuddin, Ss. M. Si
 5. Andi Awaluddin
 6. Anggota
- g. Camat Sekabupaten Soppeng
1. Kasi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan
 2. Kasi Penanganan Fakir Miskin Pedesaan
 3. Staf Dinas Sosial Kabupaten Soppeng

B. Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng

Menurut pakar ilmu kebijakan publik Edward III tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan

tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan kebijakan itu sendiri.

Dalam lingkup wilayah Kabupaten Soppeng Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Kartu Macca Program Kartu Macca dalam rangka mememberdayakan masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendapatan rendah atau masyarakat tergolong miskin. Peraturan Daerah tersebut telah ditetapkan sejak tahun 2016 dan di laksanakan pada bulan agustus 2016

Sesuai dengan teori Edward III yang penulis gunakan dalam melihat Implementasi Kebijakan Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng. Edward III menjelaskan bahwa ada empat variabel yang menjadi indikator keberhasilan pengimplementasian suatu kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, struktur birokrasi dan disposisi.

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dideskripsikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang akan disesuaikan dengan teori model implementasi Edward.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Pengaruh komunikasi terhadap implementasi adalah pada kejelasan dan isi pesan untuk dapat dipahami secara menyeluruh oleh penerima pesan atau program. Dalam hal ini komunikasi

akan dapat dilihat dari berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan proses implementasi kebijakan program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng.

Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng dapat kita lihat pada dimensi berikut:

a. Transmisi

Dimensi transmisi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Sosialisasi mengenai program Kartu Macca telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Maret 2017 di Aula Kantor BKPD di Cikke'e Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Peserta terdiri dari 80 orang yang terdiri dari Lurah/Kades sekabupaten Soppeng serta kepala SKPD yang terkait dalam Program Kartu Macca. Tujuan pelaksanaan sosialisasi program Kartu Macca adalah untuk mensukseskan pemberdayaan Fakir Miskin dalam hal mendukung penyelenggaraan Kartu Macca, memudahkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Penyaluran Bantuan dan Subsidi dengan adanya sistem yang terintegrasi terhadap SKPD terkait dengan Penyaluran Bantuan dan Subsidi. Sebagaimana dikatakan oleh Sekda Kabupaten Soppeng, beliau mengatatakan bahwa:

“sosialisasi sudah dilakukan bersama bupati,wakil bupati, kepala skpd, camat/ lurah/ kades sekabupaten Soppeng. Disitu sudah disampaikan semua masalah program Kartu Macca. Mulai dari persyaratanya, manfaatnya dan sebagainya semuanya sudah disampaikan. Nah disitu juga dihimbau kepada seluruh camat dan perangkat desa untuk menyampaikan

kepada masyarakatnya masing-masing. Khususnya masyarakat kurang mampu” (wawancara dengan ATS, Rabu 29 Agustus 2018).

Terkait wawancara yang dilakukan oleh Sekda dapat diketahui bahwa dalam implementasi program Kartu Macca, pemerintah daerah hanya sekali melakukan sosialisasi bersama Bupati, Wakil Bupati, Lurah/Kades se-Kab. Soppeng serta kepala SKPD yang terkait dalam Program Kartu Macca. Sedangkan sosialisasi Program Kartu Macca kepada kelompok sasaran atau masyarakat Kabupaten Soppeng khususnya warga yang kurang mampu dilakukan oleh masing-masing camat dan perangkat desa Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial, beliau mengatakan bahwa:

“kalau masalah sosialisasi, kami dinas sosial tidak melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat. Namun pada saat sosialisasi bersama bupati dan juga camat serta perangkat desa, telah dihimbaukan kepada camat serta perangkat desa agar menyampaikan informasi program Kartu Macca kepada masyarakat dan untuk masyarakat yang memenuhi syarat atau masyarakat yang kurang mampu untuk diarahkan ke Dinas Sosial mengambil Kartu Macca untuk selanjutnya digunakan”. (wawancara dengan HN, Senin 3 September 2018).

Berdasarkan pernyataan dari informan di atas dapat dilihat bahwa pihak Dinas Sosial tidak melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat. Namun yang dihimbau untuk menyampaikan informasi tentang program Kartu Macca adalah pihak Camat dan perangkat desa. Hal ini sama dengan pernyataan dari Kepala Bidang Hukum yang menyatakan bahwa:

“untuk sosialisasi program Kartu Macca ini kami sebelumnya sudah melakukan sosialisai bersama seluruh camat yang ada di Kabupaten Soppeng serta perangkat desa, nah, dari camat dan perangkat desa kemudian disampaikan kepada masyarakat. Tapi saat ada acara seperti tudang sipulung, atau musrembang kami juga selipkan atau sampaikan

tentang program Kartu Macca khususnya bantuan hukum gratis”(wawancara dengan AMS, senin 3 september 2018).

Pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah tidak membuat agenda khusus untuk melakukan sosialisasi terkait dengan program Kartu Macca dengan masyarakat, hanya saja pada saat ada kegiatan bersama masyarakat, pemerintah juga selipkanatau menyampaikan informasi tentang program baru Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu program Kartu Macca. Tidak adanya sosialisasi khusus kepada masyarakat akan mengakibatkan terjadinya salah pengertian dalam penyaluran komunikasi. mengingat bahwa sosialisasi dalam pelaksanaan suatu program itu sangatlah penting agar implementor maupun kelompok sasaran dalam program tersebut dapat paham dan mengerti dengan program yang di implementasikan.

Dilanjutkan dengan wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menyatakan hal yang sama dengan Kadis Sosial dan juga Kabid Hukum bahwa:

“sosialisasi tentang Kartu Macca sudah himbau kepada seluruh camat beserta perangkat desa untuk menyampaikan kepada masyarakatnya saat mengikutis sosialisasi Kartu Macca kemarin bersama Bupati. Untuk program ini ini tidak ada kegiatan sosialisasi secara khusus kepada masyarakat, cuma diikutkan saja kalau ada acara rapat atau tudang sipulung di masyarakat kami sampaikan masalah Kartu Macca kepada masyarakat”(wawancara dengan AMI, Sselasa 4 september 2018).

Hal yang diutarakan oleh Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil senada dengan yang diutarakan oleh Kepala Bidang Hukum bahwa tidak ada sosialisasi khusus yang dilakukan kepada masyarakat namun pada saat ada

kegiatan atau pertemuan dengan masyarakat pemerintah akan menyisipkan atau menyampaikan informasi tentang Kartu Macca pula.

Tidak adanya sosialisasi langsung kepada masyarakat mengakibatkan adanya masyarakat yang tidak paham dan mengerti tentang program Kartu Macca baik itu manfaat, persyaratan hingga tujuan program Kartu Macca tersebut. Hal itu NB selaku masyarakat yang menerima Kartu Macca terkait dengan informasi yang diterima tentang Kartu Macca.

“sebelumnya tidak tau ka nak apa itu Kartu Macca, dari desa ji di sampaikan kalau disuruhki ke dinas sosial untuk urus Kartu Macca.”(wawancara dengan NB, minggu 9 sepetember 2018).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, masyarakat yang berhak menerima Kartu Macca hanya mendapatkan informasi dari desa untuk mengurus Kartu Macca di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng tanpa adanya informasi terlebih dahulu terkait program Kartu Macca tersebut baik itu persyaratan mendapatkan Kartu Macca, sasaran Kartu Macca serta manfaat Kartu Macca tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan teori Edward III yang dimana dalam implementasi program baik implementor maupun sasaran program harus paham dan mengetahui tentang program tersebut agar program berjalan secara efektif. Begitupun yang diutarakan oleh SM yang menyatakan bahwa:

“kalau masalah Kartu Macca sudah disampaikan dari desa. Ada beberapa nama yang berhak mendapatkan Kartu Macca dan diarahkan untuk ke kantor dinas sosial untuk mendapatkan Kartu Macca untuk digunakan”. (wawancara dengan SM, minggu 9 september 2018)

Hasil wawancara yang dilakukan dengan informan menyatakan bahwa sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan kepala

SKPD, camat dan perangkat desa. Dan untuk sosialisasi kepada kelompok sasaran atau masyarakat hanya dilakukan oleh perangkat desa dan bagi kelompok sasaran dihimbau untuk ke Dinas sosial untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan juga mendapatkan Kartu Macca untuk digunakan.

Transmisi program Kartu Macca dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng pada tanggal 17 Maret 2017 di Aula Kantor BKPD di Cikke'e Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng. Peserta terdiri dari 80 orang yang terdiri dari Lurah/Kades se-Kab. Soppeng serta kepala SKPD yang terkait dalam Program Kartu Macca. Tujuan pelaksanaan sosialisasi program Kartu Macca adalah untuk mensukseskan pemberdayaan Fakir Miskin dalam hal mendukung penyelenggaraan Kartu Macca, memudahkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Penyaluran Bantuan dan Subsidi dengan adanya sistem yang terintegrasi terhadap SKPD terkait dengan Penyaluran Bantuan dan Subsidi.

Namun sosialisasi mengenai program Kartu Macca kepada masyarakat kurang maksimal. Pemerintah daerah dan SKPD terkait tidak melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat. Masyarakat setempat kurang tahu mengenai maksud, tujuan serta syarat program tersebut. Dengan rendahnya intensitas penyampaian program kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat tidak tahu tentang Kartu Macca tersebut.

b. Kejelasan Informasi

Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak membingungkan pelaksana program, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan informasi yang terkandung dalam Program Kartu Macca ini sudah jelas bahwa tujuan program ini adalah untuk memberdayakan masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat tergolong miskin serta memudahkan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan penyaluran bantuan bersubsidi kepada masyarakat kurang mampu, masyarakat berpendapatan rendah, masyarakat tergolong miskin tersebut sebagaimana dalam wawancara yang dikatakan oleh Sekda Kabupaten Soppeng bahwa:

“tujuan dari program Kartu Macca ini sudah jelas untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng yang dinilai kurang mampu dan hadirnya program Kartu Macca ini tertuang dalam Peraturan Bupati Soppeng No. 23 Tahun 2016”(wawancara dengan ATS, rabu,29 agustus 2018).

Terkait wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program Kartu Macca terkait tujuan program Kartu Macca sudah jelas yang dimana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Soppeng yang dinilai kurang mampu dan hadirnya program Kartu Macca ini tertuang dalam Peraturan Bupati Soppeng No. 23 Tahun 2016

Lebih lanjutnya lagi dijelaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan dalam kejelasan informasi sebagai berikut:

“kalau berbicara masalah tujuan dari program Kartu Macca ini sudah jelas bahwa tujuannya memberikan bantuan kepada masyarakat yang tergolong

kurang mampu serta memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pemenuhan kebutuhannya. Kartu Macca ini pun juga dapat membantu pemerinta daerah dalam penyaluran bantuan agar tepat sasaran”. (wawancara dengan HL, Kamis 29 Agustus 2018)

Dalam kutipan wawancara diatas bisa dilihat bahwa hadirnya program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng ini diperuntukkan masyarakat yang termasuk golongan kurang mampu, berpendapatan rendah atau masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Soppeng. Namun berbeda dengan masyarakat Kabupaten Soppeng. Tidak semua masyarakat tau tentang program pemerintah tersebut. Seperti dengan hasil wawancara dengan warga yang menyatakan bahwa :

“kalau Kartu Macca saya pernah dengar nak, tapi untuk manfaat atau sebagainya saya tidak tau. Hanya saja saya pernah mendengar kalau ada bantuan dari pemerintah melalui Kartu Macca”. (wawancara dengan AD, Minggu, 9 September 2018).

Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh masyarakat diatas dapat dikatakan bahwa kejelasan informasi mengenai program baru pemerintah ini yaitu program Kartu Macca masih belum jelas dimasyarakat dimana masih ada masyarakat hanya sekedar mengetahui program Kartu Macca hanya sebatas nama saja, terkait manfaat, tujuan dan informasi lain tentang Kartu Macca tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

Masalah kejelasan informasi terkait program Kartu Macca juga disampaikan oleh masyarakat Kabupaten Soppeng yang menyatakan bahwa:

“masalah Kartu Macca saya hanya mengetahui dari tetangga saya yang ingin ke Dinas Sosial dulu untuk mengambil Kartu Macca, katanya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu”. (wawancara dengan HS, Rabu, 29 Agustus 2018)

Berdasarkan petikan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan program yang diterima oleh Implementor atau pelaksana program sudah jelas yang dimana hadirnya program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng ini diperuntukkan masyarakat yang termasuk golongan kurang mampu, berpendapatan rendah atau masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Soppeng. Namun berbeda dengan masyarakat Kabupaten Soppeng. Tidak semua masyarakat tau tentang program pemerintah daerah tersebut.

2. Sumber daya

Sumber daya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan suatu maksud yang telah ditetapkan. Sumber daya berguna untuk menunjang implementasi dari suatu kebijakan. Tanpa adanya sumber daya yang cukup dan memadai, implementasi suatu kebijakan akan terganggu dan menjadi agak sulit untuk dilaksanakan. Sumber daya yang ada pada pihak pembuat dan pelaksana kebijakan haruslah cukup dan memadai sesuai dengan apa yang tertera di dalam peraturan. Selain itu, pihak pembuat dan pelaksana kebijakan harus menggunakan sumber daya secara cermat dan sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan. Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai sumber daya yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia/ Staf

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses implementasi. Apabila sumber daya manusia dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, maka kegiatan organisasi tidak akan

berjalan secara optimal. Di sisi lain, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal.

Sumber daya manusia berkaitan dengan staf atau aparat pelaksana apakah sudah cukup tersedia atau perlu adanya penambahan staff implementor kebijakan. Program Kartu Macca ini dirancang dan diajukan oleh Bupati Kabupaten Soppeng sebagai salah satu Visi Misi Kabupaten Soppeng. Namun karena dalam Kartu Macca ini terdapat beberapa program maka dalam pengimplementasiannya dilakukan oleh beberapa SKPD terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, serta Bagian Hukum dan Peundang-Undangan. Dalam pembuatan sampai pembagian Kartu Macca dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Soppeng.

Berikut ini adalah petikan hasil wawancara dengan Sekda Kabupaten Soppeng dan kepala SKPD Kabupaten Soppeng:

“sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program Kartu Macca ini. Karena dalam mengimplementasikan program ini perlu kemampuan seseorang, dalam hal ini setiap skpd yang terkait harus memiliki kemampuan dalam mengimplementasikan program Kartu Macca”(wawancara dengan ATS, rabu 29 agustus 2018)

Terkait wawancara dengan ATS dapat dikatakan bahwa kemampuan suatu sumber daya manusia sangatlah penting dalam pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai serta tidak kompeten didalamnya. Namun staf yang memadai

belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staff harus mempunyai keterampilan dan kompeten dibidangnya masing-masing.

Dalam pelaksanaan program Kartu Macca ini telah dibentuk Tim Koordinasi. Yang meliputi beberapa kepala SKPD serta beberapa pihkan yang terkait dengan Program Kartu Macca. Masing-masing telah memiliki tuposki. Dan dalam mengimplementasikan Program Kartu Macca tersebut, Dinas Sosial melakukan pendataan sampai pembagian Kartu Macca. Jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dapat dilihat pada uraian berikut:

Tabel 4.2

Daftar Pegawai Dinas Sosial

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Pejabat Eselon II B	1
2	Pejabat Eselon III B	3
3	Pejabat Eselon IV B	2
4	Pejabat Eselon III A	1
5	Pejabat Eselon IV A	14
6	Staff Dinas	56
	JUMLAH	77

sumber: daftar pegawai dinas sosial Kabupaten Soppeng 2016

Terkait dengan jumlah pegawai Dinas Sosial diatas tidak seluruhnya terlibat dalam pengimplementasian Program Kartu Macca tersebut karena dibagi atas bagian yaitu bidang perlindungan jaminan sosial, bidang rehabilitasi sosial, bidang pemberdayaan sosial dan bidang penanganan fakir miskin. Jadi hanya bagian penanganan fakir miskin yang terlibat dalam pengimplementasian program Kartu Macca tersebut.

Berdasarkan observasi yang dilakukan bahwa di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng yang mendapatkan tanggung jawab terkait program

Kartu Macca di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng adalah bidang penanganan fakir miskin. Dalam bidang tersebut masing-masing memiliki tugas dalam pelaksanaan program Kartu Macca. Yaitu koordinator operator/ pelayanan Kartu Macca, Operator pengimputan/ percetakan Kartu Macca, pelayanan Kartu Macca, serta coocentral. Berikut wawancara dengan Kepala Dinas Sosial:

“dalam pelaksanaan program Kartu Macca tidak semua pegawai dilibatkan. Hanya bidang penanganan fakir miskin saja yang mengimplementasikan program Kartu Macca. Bidang tersebut memiliki 14 pegawai yang dimana terdiri dari 1 kepala bidang, 3 kepala seksi, dan 10 staf”. (wawancara dengan HN, senin 3 september 2018)

Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng sesuai dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti dimana dalam implementasi program Kartu Macca hanya melibatkan pegawai dibidang tertentu saja, di Dinas Sosial pegawai yang terlibat dalam implementasi program Kartu Macca ada pegawai dibidang penanganan fakir miskin yang terdiri dari 14 pegawai terdiri dari 1 kepala bidang, 3 kepala seksi, dan 10 staf. Sumber manusia merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan karena manusia merupakan penggerak laju implementasi suatu kebijakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Agustino (2008:142) bahwa tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurutnya adanya sumber manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapasitas dari sumber daya itu nihil, maka keberhasilan kebijakan akan sulit untuk diharapkan. Dari bidang

penanganan fakir miskin sendiri membenarkan pernyataan Kadis Sosial yang menyatakan:

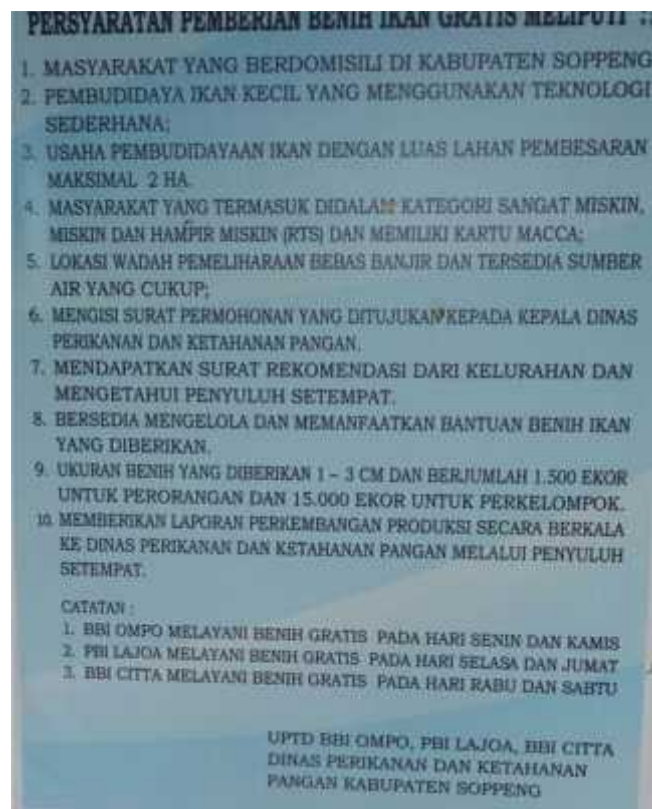
“iya memang hanya bidang penanganan fakir miskin saja yang mengimplementasikan program Kartu Macca ini. Karena kami bidang penanganan fakir miskin memiliki tugas melakukan pendataan, percetakan, sampai pembagian Kartu Macca”. (wawancara dengan HA, senin 3 september 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam implementasi program Kartu Macca ini tidak semua pegawai di dinas tersebut terlibat dengan program pemerintah tersebut. Hanya pegawai dibidang tertentu saja. Sama dengan Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan hanya pegawai di bidang Peikanan Budidaya yang terlibat dalam program Kartu Macca.

Dalam observasi yang telah dilakukan peneliti di Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan bahwa dalam pengimplementasian Program Kartu Macca khususnya benih ikan gratis, hanya pegawai di bidang perikanan budidaya yang mengerti tentang program tersebut. Dapat dilihat juga bahwa masyarakat penerima Kartu Macca yang ingin mendapatkan benih ikan gratis langsung datang ke bidang perikanan budidaya untuk memperlihatkan persyarakatan pemberian benih ikan gratis dan selanjutnya mendapatkan benih ikan gratis tersebut. Adapun syarat pemberian benih ikan gratis meliputi:

Gambar 4.3

Persyaratan Pemberian Benih Ikan Gratis



Sumber: Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan

Seperti yang diutarakan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan

Pangan bahwa:

“di dinas perikanan dan ketahanan pangan ini, hanya bidang perikanan budidaya yang mengetahuinya. Karena dilihat dari manfaat program Kartu Macca salah satunya adalah benih ikan gratis yang dimana dikelola oleh bidang perikanan budidaya yang terdiri dari 13 pegawai yaitu kepala bidang, seksi pemberdaya usaha kecil dan pembudidayaan ikan, seksi kesehatan ikan dan lingkungan, seksi pengelolaan pembudidayaan ikan serta staf.”(wawancara dengan HS, Kamis 30 Agustus 2018).

Dari wawancara yang dilakukan, terkait dengan sumber daya manusia atau staff dapat dikatakan bahwa dalam implementasi program Kartu Macca ini hanya beberapa pegawai saja yang terlibat dan mengetahui tentang Kartu Macca tersebut. Dalam hal ini perlu diadakan peningkatan sumber daya

manusia lagi agar dapat mengimplementasikan Program Kartu Macca lebih optimal dan maksimal lagi.

Sumber daya manusia meliputi jumlah dan keahlian dari pelaksana. Jumlah pegawai dinas sosial bagian penanganan fakir miskin sebagai pelaksana program Kartu Macca ada empat belas pegawai. Dan keanggotaan ini sudah cukup jumlahnya dilihat dari pelaksanaan kegiatan mulai dari percetakan blangko sampai evaluasi dilaksanakan bidang penanganan fakir miskin dengan baik. Dalam pelayanan Kartu Macca dilakukan oleh beberapa SKPD terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Masing-masing SKPD terkait memiliki pegawai dibidang tertentu untuk menjalankan program Kartu Macca tersebut.

b. Sumber Daya Finansial

Dalam implementasi suatu kebijakan atau program, finansial merupakan sumber daya yang tidak kalah pentingnya dengan manusia. Ketika sumber daya manusia yang kompeten dan cukup telah tersedia sedangkan anggaran tidak tersedia maka memang akan menjadi persoalan untuk merealisasikan atau mengimplementasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan atau program tersebut. Dalam wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng terkait masalah sumber daya finansial dikatakan bahwa:

“kalau berbicara masalah anggaran dalam implementasi suatu kebijakan itu adalah hal yang penting. Semua program atau kebijakan ingin dijalankan membutuhkan dana, bagaimana bisa jalan program kalau tidak ada dana, kan itu. Nah sama halnya dengan program Kartu Macca. Program ini sudah disediakan dana dari APBD. Mulai dari persiapannya sampai dengan pelaksanaan programnya yaitu manfaat dari program Kartu Macca. Masing-masing SKPD yang terkait mendapatkan anggaran dari APBD dalam menjalankan manfaat Kartu Macca tersebut, seperti bebas tebus raskin, itu ada dana yang disediakan, bebas biaya kesehatan, bebas, biaya pendidikan dan lain-lain, semuanya itu sudah disediakan anggarannya dengan total sekitar 10 Miliar yang disiapkan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Soppeng saat sosialisasi kemarin”. (wawancara dengan ATS, rabu 29 Agustus 2018).

Terkait wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program Kartu Macca. Yang dimana mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan programnya yaitu manfaat dari program Kartu Macca. Masing-masing SKPD yang terkait mendapatkan anggaran dari APBD dalam menjalankan manfaat Kartu Macca tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa sumber finansial atau anggaran dalam implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng sudah baik. Dimana anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk program tersebut adalah sekitar 10 miliar rupiah.

Dinas Sosial terkait masalah sumber daya finansial juga membenarkan hal tersebut sesuai yang dikatakan bahwa:

“untuk program Kartu Macca, Dinas Sosial memiliki sumber dana dari APBD dengan jumlah RP.181.421.000,00 itu juga sudah termasuk dalam kegiatan percetakan blangko Kartu Macca, pelaksanaan sosialisasi program Kartu Macca, pendataan monitoring dan evaluasi. ”. (wawancara dengan HN, senin 3 september 2018)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk dukungan pemerintah terkait dengan program Kartu Macca yaitu

penyediaan anggaran. Yang dimana anggaran dalam implementasi program Kartu Macca sangatlah penting. suatu program tidak dapat berjalan tanpa adanya anggaran yang di sediakan. Dari bidang penanganan fakir miskin pun menyatakan hal sama kalau dinas sosial memiliki dana dari APBD untuk pelaksanaan program Kartu Macca dan juga terkait manfaat program Kartu Macca yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial yaitu bebas tebus raskin seperti yang dikatakan oleh PN bahwa:

“untuk pelaksanaan program Kartu Macca ini dana yang kami gunakan itu dari APBD 2016 dan 2017, dan kalau masalah bebas tebus raskin dari Kartu Macca kita juga menggunakan dana APBD yang dimana dana yang digunakan dalam program tersebut yaitu Rp.1.315.800.000,00”. (wawancara dengan PN, senin, 3september 2018)

Dari wawancara yang dilakukan diatas, secara finansial Dinas Sosial tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan program Kartu Macca baik dalam kegiatan Kartu Macca (mulai dari percetakan blangko sampai monitoring) maupun pengimplementasian program Kartu Macca khusus bebas tebus rastra. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala Bidang Hukum dan Perundang-Undangan berikut ini:

“kalau untuk program Kartu Macca dibidang hukum yaitu bebas biaya konsultasi dan bantuan hukum kami menerima anggaran dari APBD sejumlah Rp.108.000.000,00. Dalam bantuan ini kami melakukan bantuan ini kami menargetkan 10 orang tahun ini. Dengan ketentuan 1 orang ini maksimal 2 kali bantuan”. (wawancara dengan AMS, selasa 4 september 2018)

Dari wawancara yang dilakukan perihal sumber daya finansial dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Daerah sudah mempersiapkan dana untuk pelaksanaan Program Kartu Macca. Dan setiap SKPD yang terkait sudah mendapatkan dana dari APBD tersebut untuk mengimplementasikan

program Pemerintah Kabupaten Soppeng yaitu Program Kartu Macca. Dimana dalam merealisasikan program Kartu Macca Dinas Sosial Kabupaten Soppeng menganggarkan sebesar Rp.181.421.000,00 dari APBD 2017. Sedangkan untuk beberapa manfaat program Kartu Macca, pemerintah menganggarkan sebesar Rp.10.267.992.000,00 dari APBD. Dalam hal ini terkait indikator sumber daya finansial sudah dapat dikatakan efektif dengan anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Soppeng.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor atau pelaksana kebijakan setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan tersebut maka implementor akan melakukan dan melaksanakannya dengan senang hati namun apabila pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para implementor terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni kognisi (pemahaman) serta respon (dukungan) implementor.

a. Kognisi (pemahaman)

Kognisi atau pemahaman aparat pelaksana atau implementor tentang program Kartu Macca ini sudah cukup dipahami. Dalam observasi yang telah dilakukan terlihat pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng khususnya di

bidang penanganan fakir miskin sudah mengetahui tupoksi masing-masing. Terlihat pegawai dalam melakukan pelayanan terkait program kartu macca ini sudah sigap. Masyarakat yang datang untuk mengurus kartu macca langsung mendapatkan pelayanan dari pegawai. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial:

”kalau berbicara masalah pemahaman pegawai di dinas sosial bisa dikatakan cukup baik dimana pegawai khususnya dibidang penanganan fakir miskin sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik dilihat dari pengimplementasian program Kartu Macca dibidang sosial yaitu bebas tebus rastra sejauh ini berjalan dengan baik namun perlu juga peningkatan”. (wawancara dengan HN, senin 3 september 2018)

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial dapat dikatakan bahwa dalam indikator kognisi atau pemahaman pegawai di dinas sosial dapat dikatakan sudah cukup baik dilihat dari pengimplementasian program Kartu Macca di bidang sosial yaitu bebas tebus rastra berjalan dengan baik. Senada dengan yang diutarakan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menjelaskan bahwa pemahaman dari pegawai sudah cukup baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, berikut ini pernyataan yang disampaikan HS:

“menurut saya pemahaman para pegawai Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan ini khususnya di bidang perikanan budidaya dalam mengimplementasikan program Kartu Macca khusus benih gratis sudah cukup baik, dimana pegawai dibidang perikanan sudah tegas kepada masyarakat yang ingin mengambil benih gratis agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dan juga pegawai juga dapat memberikan arahan dan informasi dengan baik terkait benih gratis in”. (wawancara dengan HS, Kamis, 30 Agustus 2018)

Dapat dikatakan pegawai di bidang perikanan budidaya dinas perikanan dan ketahanan pangan sudah memahami tupoksi yang diembannya. Dimana

pegawai akan memberikan benih gratis bagi masyarakat yang bersyarat dan juga akan memberikan arahan dan penjelasan terkait benih gratis ini bagi masyarakat yang kurang paham. Ini sesuai dengan pernyataan masyarakat sebagai pemegang Kartu Macca yang mendapatkan benih ikan gratis bahwa:

“dulu sebelum adanya Kartu Macca saya dan suami mengambil benih ikan dengan menggunakan KTP namun sekarang sudah menggunakan Kartu Macca, dimana ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Awalnya saya tidak mengerti dengan persyaratan tersebut namun saya dibantu dan terus diarahkan oleh pegawai dinas perikanan dan ketahanan pangan”. (wawancara dengan NH, sabtu 8 september 2018).

Terkait dengan hasil wawancara yang dilakukan mengenai indikator kognitif atau pemahaman pegawai sudah cukup baik. Pegawai yang terlibat dengan implementasi program Kartu Macca ini sudah memahami masalah program yang dijalankannya. Seperti yang diteori Edward III dalam indikator kognisi bahwa dalam mengimplementasikan suatu program implementor harus paham terlebih dahulu mengenai program tersebut, khususnya dalam program Kartu Macca pegawai atau implementor harus mengetahui tujuan, manfaat, sasaran serta persyaratan program Kartu Macca. Namun walaupun pegawai sudah dinilai cukup baik dalam melaksanakan program Kartu Macca namun masih perlu adanya upaya guna memberikan pemahaman seutuhnya dari implementasi program Kartu Macca.

b. Respon (dukungan)

Respon atau dukungan pelaksana implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng dalam hal ini pegawai di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng. Berikut ini pernyataan oleh Kadis Sosial:

“berbica mengenai dukungan pelaksana program Kartu Macca, pegawai di dinas sosial khususnya bidang penanganan fakir miskin yang mengimplementasikan program Kartu Macca tersebut siap tidak siap ya harus siap kan, harus beradaptasi dan juga mengerti akan tugas yang diberikan karena itu sangat penting”. (wawancara dengan HN, senin 3 september 2018).

Terkait wawancara yang dilakukan diatas dapat disimpulkan bahwa Kepala Dinas Sosial menegaskan bahwa pelaksana atau implementor program Kartu Macca harus siap, harus beradaptasi dan harus mengerti akan tugas yang diberikan terkait program Kartu Macca. Senada dengan yang dikatakan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengenai respon atau dukungan pegawainya khususnya dibidang PIAK dan pemanfaatan data yang mengatakan bahwa:

“yaa pegawai harus siap dalam menerima kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti program Kartu Macca ini. Sejauh ini di dinas kependudukan dan pencatatan sipil mendukung program Kartu Macca ini, dilihat dari kinerja pegawai dalam menjalankan program Kartu Macca ini yang cepat tanggap semenjak adanya SK Bupati Kabupaten Soppeng mengenai pelaksanaan program Kartu Macca di bidang kependudukan yaitu bebas biaya administrasi kependudukan”. (wawancara dengan AMI, kamis 4 september 2018)

Jadi berdasarkan wawancara dengan AMI dapat dikatakan bahwa sikap implementor sudah mendukung program Kartu Macca tersebut dilihat dari sikap pegawai yang mendukung dan menjalankan tupoksinya dengan baik sejak adanya SK Bupati Kabupaten Soppeng. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Kepala Bidang Hukum dan Perundang-undangan bahwa:

“berbicara masalah dukungan implementor terhadap program Kartu Macca, kami bagian hukum dan undang-undang sangat mendukung program pemerintah tersebut, ini juga akan mempermudah kami dalam penyaluran bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dan tentunya itu pun mempermudah masyarakat dalam mendapatkan bantuan hukum gratis bagi

masyarakat yang memiliki Kartu Macca”. (wawancara dengan AMS,selasa 4 september 2018).

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa bagian hukum dan undang-undang sangat mendukung adanya program pemerintah tersebut. Berdasarkan tujuan program Kartu Macca yaitu mempermudah pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuannya agar tepat sasaran. Hal ini sangat didukung oleh implementor di bidang hukum dan undang-undang dilihat dari respon pegawai tentang program Kartu Macca khususnya dalam manfaat program Kartu Macca yaitu pemberian bantuan hukum gratis bagi pemegang Kartu Macca.

Adapun yang dikatakan oleh Kedis Perikanan dan Ketahanan pangan berkaitan dengan disposisi pelaksana implementor yang senada dengan hasil wawancara diatas bahwa:

“kami dinas perikanan dan ketahanan pangan sangat mendukung program Kartu Macca ini, yang dimana ini adalah visi misi dari bupati dan wakil bupati terpilih kemarin. Dan ini hanya ada di Kabupaten Soppeng saja. Dilihat dari sikap pelaksana di dinas perikanan dan ketahanan pangan ini, pegawai khususnya di bidang perikanan budidaya sebagai implementor sudah menjalankan tupoksinya sesuai dengan yang ditetapkan terkait dengan program Kartu Macca ini”. (wawancara dengan HS, 30 agustus 2018).

Terkait dengan hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa terkait dengan Respon pelaksana program Kartu Macca serta SKPD terkait implementasi program Kartu Macca sudah cukup baik, karena pegawai telah mengadari tanggung jawab dan harus menaati aturan yang ada serta menjalankan tugas yang telah diemban sebagaimana semestinya.

Dilihat juga manfaat Kartu Macca di jalankan oleh SKPD terkait berjalan dengan baik. Namun harus lebih ditingkatkan lagi pemahaman implementor terkait program Kartu Macca agar dapat lebih efektif lagi pengimplementasiannya.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan atau program. Dalam struktur birokrasi ada dua aspek yang harus diperhatikan yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama yaitu mekanisme yang menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran. Mekanisme pelaksanaan program Kartu Macca sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016. Seperti halnya yang disampaikan oleh Sekda Kabupaten Soppeng yang menyatakan bahwa:

“mekanisme dalam implementasi perogram Kartu Macca itu sudah diatur dalam Perbup Nomor 23 tahun 2016, dan telah dilakukan sosialisasi pada semua kepentingan atau SKPD yang terkait”. (wawancara dengan ATS, rabu 29 agustus 2018).

Dari wawancara diatas dengan Sekda dapat dikatakan bahwa terkait struktur birokrasi sudah jelas dimana sudah diatur dalam Perbup Nomor 23 tahun 2016. Dalam perbup tersebut sudah terdapat mekanisme palaksanaan program Kartu Macca, manfaat program Kartu Macca, tujuan program Kartu Macca, sasaran program Kartu Macca, persyaratan program Kartu Macca, pihak terkait dalam implmementasi program Kartu Macca. Semuanya sudah diatur di dalam Perbup Nomor 23 Tahun 2016.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kadis Kesehatan bahwa mekanisme pelaksanaan program Kartu Macca tersebut sudah diatur semuanya di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng.

“iya kalau mengenai mekanismenya semuanya sudah diatur dalam Perbup dan semuanya sudah jelas”.(wawancara dengan SG, rabu 4 september 2018)

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016, menjelaskan bahwa yang menjadi pelaksana dan penanggung jawab dalam setiap kebijakan adalah pemerintah daerah dalam hal ini dibantu oleh instansi terkait. Instansi terkait yang dimaksudkan adalah Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Mengingat dalam Kartu Macca memiliki beberapa manfaat. Dalam proses persiapan program Kartu Macca yaitu percetakan blangko, sosialisasi, verifikasi, pembagian, dan monitoring itu dilaksanakan oleh Dinas Sosial sedangkan untuk pelayanan dilaksanakan oleh beberapa SKPD terkait manfaat program Kartu Macca. Berikut hasil wawancara dengan Sekda Soppeng :

“dalam program Kartu Macca pelaksanaan dilakukan oleh Dinas Sosial dan itu sudah ada Keputusan Bupati Soppeng tentang tim koordinasi pelaksanaan program Kartu Macca pemerintah Kabupaten Soppeng. Dan itu sudah dirapatkan sebelumnya bersama instansi terkait”. (wawancara dengan ATS, rabu 29 agustus 2018)

Dari wawancara diatas dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan program Kartu Macca di Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tentang tim koordinasi pelaksanaan program Kartu Macca pemerintah Kabupaten Soppeng. Hal tersebut dibenarkan oleh Kadis Sosial perihal Keputusan Bupati

Soppeng tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Kartu Macca Pemerintah Kabupaten Soppeng yang menyatakan bahwa:

“kami Dinas Sosial telah menerima Keputusan Bupati Soppeng dalam pelaksanaan Program Kartu Macca, hal ini menyangkut manfaat program Kartu Macca yang salah satunya adalah bebas tebus rastra”. (wawancara dengan HN, senin, 3 september 2018).

Terkait dengan struktur birokrasi dalam pelaksanaan program Kartu Macca juga sudah jelas dalam Keputusan Bupati Soppeng tentang tim koordinasi pelaksanaan Program Kartu Macca Pemerintah Kabupaten Soppeng yang masing-masing SKPD terkait mendapatkan Surat Keputusan Bupati tersebut. Disamping itu masing-masing SKPD yang terkait akan membuat laporan surat pertanggung jawaban setelah program tersebut selesai.

C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng

Keberhasilan setiap implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng tentunya ditunjang oleh berbagai faktor, antara lain seperti faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng sebagai berikut.

1. Faktor pendukung

a. Kerjasama

Banyaknya aparat pelaksana dan seluruh instansi terkait menjadi faktor pendukung implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng. Di

dalam implementasi program Kartu Macca ini instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Dan masing-masing SKPD terkait melakukan Kerja sama atau koordinasi dengan beberapa instansi seperti Dinas Sosial bekerjasama dengan Bulog, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Sekolah-sekolah diwilayah Kabupaten Soppeng, Dinas Kesehatan Bekerjasama dengan puskesmas seKabupaten Soppeng. Seperti yang dikatakan oleh Kadis Sosial bahwa:

“dalam program Kartu Macca ini khusus bebas tebus Rastra, kami menjalin kerjasama dengan pihak bulog yang dimana bulog menyediakan beras yang berkualitas baik untuk disalurkan kepada masyarakat”. (wawancara dengan HN, rabu 3 september 2018)

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dinas Sosial dapat dikatakan bahwa dalam implementasi program Kartu Macca salah satu manfaat yang diterima dari pemegang Kartu Macca adalah bebas tebus rastra yang dimana merupakan program dari Dinas Sosial. Dalam hal ini Dinas Sosial melakukan kerjasama dengan Bulog dalam menyediakan beras yang berkualitas baik untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat khususnya masyarakat pemegang Kartu Macca. Hal ini pun senada dengan yang dikatakan dengan Kadis kesehatan dalam wawancara terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan bahwa:

“untuk mengimplementasikan program ini kami melakukan kerja sama dengan pihak puskesmas yang dimana sebagai pemberi pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang memiliki Kartu Macca tersebut”. (wawancara dengan SG, rabu 4 september 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa seperti Dinas Sosial yang melakukan kerjasama dengan Bulog, Dinas Kesehatan pun melakukan kerjasama dengan pihak puskesmas seKabupaten Soppeng dalam mengimplementasikan salah satu program Kartu Macca yaitu Bebas biaya kesehatan dasar dan persalinan. Berikut ini adalah puskesmas yang melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam program Kartu Macca khususnya bebas biaya kesehatan dasar dan persalinan.

Tabel 4.3

Puskesmas yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng

NO	NAMA PUSKESMAS	ALAMAT
1	2	3
2	Puskesmas Salotungo	Jl. Salotungo, Kel. Lalabat Rialau, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng
3	Puskesmas Sewo	Jl. Jambu, Kel. Bila, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng
4	Puskesmas Malaka	Jl. H.A. Made Alie, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng
5	Puskesmas Cangadi	Ds. Galung, Kec. Lili Riaja, Kab. Soppeng
6	Puskesmas Pacongkang	Jl. Andi Muis, Kecl. Lili Riaja, Kab. Soppeng
7	Puskesmas Gandra	Ds. Gandra, Kec. Lili Rilau, Kab. Soppeng
8	Puskesmas Cabenge	Jl. Allapporeng Ds. Cabenge, Kec. Lili Rilau, Kab. Soppeng
1	2	3
9	Puskesmas Baringeng	Calio, Kel. Ujung, Kec. Lili Rilau, Kab. Soppeng
10	Puskesmas Cakkuriddi	Ds. Abbanuangge, Kec. Lili Rilau, Kab. Soppeng
11	Puskesmas Tajuncu	Jl. Taqwa No. 2 Tajuncu, Kec. Donri- donri, Kab. Soppeng

12	Puskesmas Leworeng	Ds. Leworeng, Kec. Donri- donri,
13	Puskesmas Tanjonge	Ds. Marioriaja, Kec. Mario Riwawo, Kab. Soppeng
14	Puskesmas Takalala	Ds. Tetikenrarae, Kec. Mario Riwawo, Kab. Soppeng
15	Puskesmas Batu- batu	Jl. H. A. Meru, Ds. Batu- batu, Kec. Mario Riawa, Kab. Soppeng
16	Puskesmas Goarie	Ds. Marotengnga, Kec. Mario Riwawo, Kab. Soppeng
17	Puskesmas Panincong	Jl. Jambu, Ds. Panincong, Kec. Mario Riawa, Kab. Soppeng

Sumber : Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng

Selain itu Dinas Pendidikan pun melakukan kerja sama dengan sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng dalam mengimplementasikan program Kartu Macca di bidang pendidikan yaitu bebas biaya pendidikan sampai SMU sederajat dan penyediaan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Hal ini sama dengan yang dikatakan oleh Ir.H. Lukman, M. Si selaku Kepala Dinas Pendidikan bahwa:

“dalam program Kartu Macca khususnya bebas biaya pendidikan sampai SMU sederajat dan penyediaan beasiswa, kami melakukan kerjasama dengan pihak sekolah. Di sini ada 373 sekolah di Kabupaten Soppeng mulai dari SD sampai SMA/SMK, namun sampai sekarang kami melakukan kerja sama dengan 298 sekolah negeri yang ada di Kabupaten Soppeng”. (wawancara dengan HL, rabu 4 september 2018).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan melakukan kerjasama pula dengan pihak sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng dalam mengimplementasikan salah satu manfaat program Kartu Macca yaitu bebas biaya pendidikan sampai SMU sederajat dan penyediaan beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Kerjasama yang dilakukan Dinas Pendidikan dengan pihak sekolah yaitu pihak sekolah

mendata siswa yang memiliki Kartu Macca dan memberikan data tersebut kepada Dinas Pendidikan untuk selanjutnya diberikan bantuan dan juga diberikan beasiswa bagi siswa pemegang Kartu Macca yang berprestasi. Hal ini menjadi faktor pendukung implementasi program Kartu Macca di mana banyaknya kerjasama yang dilakukan instansi terkait dalam implementasi program Kartu Macca. Kerjasama yang baik akan memberikan hasil yang baik pula.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan dapat dikatakan bahwa kerjasama yang dilakukan Dinas yang terkait dengan implementasi program Kartu Macca dengan beberapa instansi terkait sudah cukup baik dimana dapat dilihat dinas terkait dan juga beberapa instansi yang melakukan kerjasama telah memfasilitasi kelompok sasaran program Kartu Macca dengan segenap kemampuan mereka sesuai dengan peraturan yang ada.

b. Anggaran

Anggaran merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan suatu program. Tanpa adanya anggaran yang cukup suatu kegiatan atau program tidak akan berjalan dengan baik. Dalam implementasi program Kartu Macca pemerintah memberikan dukungan melalui penyediaan anggaran yang mencukupi. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Sekda Kabupaten Soppeng bahwa:

“kalau berbicara masalah anggaran dalam implementasi suatu kebijakan itu adalah hal yang penting. Semua program atau kebijakan ingin dijalankan membutuhkan dana, bagaimana bisa jalan program kalau tidak ada dana, kan itu. Nah sama halnya dengan program Kartu Macca. Program ini sudah disediakan dana dari APBD. Mulai dari persiapannya

sampai dengan pelaksanaan programnya yaitu manfaat dari program Kartu Macca. Masing-masing SKPD yang terkait mendapatkan anggaran dari APBD dalam menjalankan manfaat Kartu Macca tersebut, seperti bebas tebus raskin, itu ada dana yang disediakan, bebas biaya kesehatan, bebas, biaya pendidikan dan lain-lain, semuanya itu sudah disediakan anggarannya dengan total sekitar 10 Miliar yang disiapkan seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati Soppeng saat sosialisasi kemarin”. (wawancara dengan ATS, rabu 29 agustus 2018).

Terkait wawancara diatas dapat dikatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk program Kartu Macca. Yang dimana mulai dari tahap persiapan sampai pelaksanaan programnya yaitu manfaat dari program Kartu Macca. Masing-masing SKPD yang terkait mendapatkan anggaran dari APBD dalam menjalankan manfaat Kartu Macca tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa sumber finansial atau anggaran dalam implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng sudah baik. Dimana anggaran yang disiapkan oleh pemerintah untuk program tersebut adalah sekitar 10 miliar rupiah.

Dinas Sosial terkait masalah sumber daya finansial juga membenarkan hal tersebut sesuai yang dikatakan bahwa:

“untuk program Kartu Macca, Dinas Sosial memiliki sumber dana dari APBD dengan jumlah RP.181.421.000,00 itu juga sudah termasuk dalam kegiatan percetakan blangko Kartu Macca, pelaksanaan sosialisasi program Kartu Macca, pendataan monitoring dan evaluasi. ”. (wawancara dengan HN, senin 3 september 2018)

Dalam wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu bentuk dukungan pemerintah terkait dengan program Kartu Macca yaitu penyediaan anggaran. Yang dimana anggaran dalam implementasi program Kartu Macca sangatlah penting. suatu program tidak dapat berjalan tanpa adanya anggaran yang di sediakan. Dari bidang penanganan fakir miskin pun menyatakan hal

sama kalau dinas sosial memiliki dana dari APBD untuk pelaksanaan program Kartu Macca dan juga terkait manfaat program Kartu Macca yang diimplementasikan oleh Dinas Sosial yaitu bebas tebus raskin.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa tersedianya anggaran menjadi faktor pendukung dari implementasi program Kartu Macca. Yang dimana pemerintah di tahun 2018 ini pemerintah menyediakan anggaran sekitar 10 milyar untuk program Kartu Macca tersebut. Dilihat dari tidak adanya pihak yang mengeluh kekurangan anggaran dalam pelaksanaan program Kartu Macca ini. Semua rangkaian kegiatan program Kartu Macca berjalan dengan baik mulai dari kegiatan percetakan blangko Kartu Macca, pelaksanaan sosialisasi program Kartu Macca, pendataan monitoring dan evaluasi. Dan terkait manfaat program Kartu Macca semuanya sudah berjalan.

2. Fator Penghambat

a. Sosialisasi

Sosialisasi sangatlah penting dalam menjalankan suatu program atau kegiatan. Pelaksana maupun kelompok sasaran harus mengetahui informasi terkait kegiatan atau program yang dilaksanakan. Dalam implementasi program Kartu Macca yang menjadi faktor penghambat yaitu sosialisasi. Tidak adanya sosialisasi langsung yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada masyarakat luas baik langsung maupun melalui spanduk. Sosialisasi hanya dilakukan oleh camat dan perangkat desa masing-masing. Sehingga pemahaman masyarakat tentang Kartu Macca ini kurang dan juga tidak

semua masyarakat Kabupaten Soppeng tahu tentang program pemerintah tersebut. Hal ini diutarakan oleh HS sebagai masyarakat Kabupaten Soppeng bahwa:

“masalah Kartu Macca saya hanya mengetahui dari tetangga saya yang ingin ke Dinas Sosial dulu untuk mengambil Kartu Macca, katanya hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu”. (wawancara dengan HS, rabu,29 agustus 2018).

Dari wawancara dengan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat mengetahui adanya program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng bukan dari sosialisasi atau penyampaian dari perangkat desa namun masyarakat mendapatkan informasi terkait dengan program Kartu Macca melalui tetangganya yakni masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program Kartu Macca. Hal ini dapat dikatakan bahwa tidak adanya sosialisasi langsung dengan masyarakat menyebabkan adanya masyarakat yang tidak tau ataupun paham dengan program pemerintah tersebut. Dan juga tidak jauh berbeda dengan yang dikatakan oleh JM bahwa:

“saya tau Kartu Macca itu pada saat ada di mesjid ditempel nama-nama yang berhak mendapatkan Kartu Macca dan nama tersebut diharapkan ke kantor Dinas Sosial untuk mendapatkan Kartu Macca serta mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang Kartu Macca”(wawancara dengan AD, kamis, 30 agustus 2018)

Berdasarkan wawancara diatas terkait dengan informasi program Kartu Macca ini dapat dikatakan bahwa perangkat desa atau pihak desa menyampaikan informasi tentang Kartu Macca dengancara menempelkan menempelkan nama-nama masyarakat penerima Kartu Macca di mesjid. Ini dapat dikatakan sangat tidak efektif karena tidak adanya tatap muka langsung antara perangkat desa dengan masyarakat membuat informasi

yang didapat masyarakat tidak jelas. Masyarakat hanya sekedar mengetahui adanya program tersebut namun tidak mengetahui lebih mendalam masalah program Kartu Macca. Sama halnya yang dikatakan oleh salah satu masyarakat bahwa:

“mengenai Kartu Macca saya tidak terlalu tahu hanya saja”. (wawancara dengan JM, rabu 29 agustus 2018).

Dari wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang program Kartu Macca dan bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui program pemerintah tersebut. Ketidaktahuan masyarakat tentang program Kartu Macca dapat dilihat dari daftar jumlah Kartu Macca yang sudah diambil oleh kelompok sasaran. Dari 13.161 penerima Kartu Macca, baru 11.686 warga yang telah mengambil Kartu Maccanya di Dinas Sosial. Ini diungkapkan oleh HA sebagai bidang penanganan fakir miskin Dinas Sosial dalam wawancara:

“sejauh ini, belum semua penerima Kartu Macca mengambil Kartu Maccanya. Masih ada beberapa penerima yang belum mengambil Kartu Macca di sini. Yang tersalurkan masih 11.686 Kartu Macca padahal Kartu Macca yang cetak ada 13.161Kartu Macca”. (wawancara dengan HA)

Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa karena sosialisasi yang tidak efektif mengakibatkan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahkan tidak paham tentang program Kartu Macca tersebut. Ini dapat dilihat dari penerima Kartu Macca yaitu 13.161 warga namun baru 11.686 warga yang telah mengambil Kartu Maccanya di Dinas Sosial.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Implementasi Program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng, maka ditarik kesimpulan bahwa implementasi program Kartu Macca di Kabupaten Soppeng sesuai dengan Peraturan Bupati No.23 Tahun 2016 belum cukup maksimal, karena dapat dilihat dari komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah hanya sekali dilakukan bersama Bupati, Wakil Bupati, SKPD terkait, camat serta perangkat desa sekabupaten Soppeng. Dan juga tidak ada sosialisasi langsung yang dilakukan oleh Dinas Sosial masalah program Kartu Macca. Hanya saja dihimbau kepada seluruh camat dan perangkat desa untuk disampaikan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang bersyarat dan berhak menerima Kartu Macca tersebut. Sehingga mengakibatkan kurang pemahamnya masyarakat terkait dengan program pemerintah tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti, bahwa walaupun sumber finansial sudah mencukupi kemampuan dan pemahaman sumber daya manusia masih harus ditingkatkan terkait masih ada pegawai yang belum mengerti dengan program tersebut. kemudian berkaitan dengan pemahaman dan respon implementor dapat dikatakan sudah cukup baik namun walaupun pegawai sudah dinilai cukup baik dalam melaksanakan program Kartu Macca namun masih perlu adanya upaya guna memberikan pemahaman seutuhnya dari implementasi program Kartu Macca. Dalam hal struktur birokrasi, instansi terkait dalam mengimplementasikan program Kartu Macca ini serta alur dan mekanismenya sudah jelas dalam Perbup

tersebut dan implementor telah berperan sesuai tugas, fungsi dan tanggung jawabnya.

Terkait hasil penelitian, peneliti menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program Kartu Macca. Yang menjadi faktor pendukung dalam program ini adalah kerjasama serta anggaran yang disediakan oleh pemerintah. Di dalam implementasi program Kartu Macca ini instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan serta Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan. Masing- masing Dinas terkait menjalin kerjasama dengan beberapa instansi dalam mengimplementasikan program Kartu Macca. Serta anggaran yang cukup disediakan oleh pemerintah menjadi faktor pendukung bagi implementasi program Kartu Macca tersebut.

Faktor yang menjadi penghambat jalannya program Kartu Macca ini adalah sosialisasi yang tidak efektif. Tidak adanya sosialisasi khusus yang dilakukan pemerintah daerah dan dan juga SKPD terkait mengakibatkan masyarakat kurang paham dengan program Kartu Macca tersebut bahkan ada masyarakat yang tidak tahu sama sekali tentang program Kartu Macca tersebut. Dan juga masih adanya masyarakat penerima Kartu Macca yang belum mengambil Kartu Maccanya di Dinas Sosial Kabupaten Soppeng Faktor penghambat lainnya adalah tidak adanya sosialisasi berupa spanduk, pamflet.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penulis maka uraian diatas dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut

- a. Pemerintah Kabupaten Soppeng dan juga instansi terkait dalam implementasi program Kartu Macca melakukan sosialisasi dengan maksimal. Jangan hanya sekedar himbauan saja, pemerintah setidaknya melakukan sosialisasi khusus kepada masyarakat agar masyarakat mengerti dan tau akan program pemerintah yang dijalankan sekarang khususnya program Kartu Macca ini.
- b. Diharapkan pemerintah kabupaten soppeng menjalin koordinasi yang baik dengan perangkat desa dan bersikap tegas kepada camat atau perangkat desa yang mengabaikan program Kartu Macca ini khususnya sosialisasi kepada masin-masing warganya.
- c. Diharapkan kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran dari program Kartu Macca untuk tidak apatis dengan program pemerintah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi.2016. *Manajemen Pelayanan Publik Aparatur Sipil Negara*.Makassar: Edukasi Mitra Grapika.
- Agustiawan. Heri. 2014. *Implementasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam*. Riau
- Agustino. 2008. *Dasar-dasarKebijakan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Akib. Haedar.2010. *Implementasi kebijakan (apa, mengapa dan bagaimana)*. Makassar
- Ali, F, dan Alam, A.S. 2012. *Studi Kebijakan Pemerinta*. Bandung: Refika Aditama.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Kasmad, Rulinawaty. 2013. *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Marshall. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik.(Edisi Revisi)*. Jakarta:LP3ES
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta:PT. Leutika Nouvalitera
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta:Universitas Gajah Mada
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Putra, Fadilla. 2003. *Paradikma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Santoso, Pandji, 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung : Pt Refika Aditama
- Scholachudin. Hanif.2016. *Implementasi Kebijakan Kurikulum 2013*. Yogyakarta
- Subarsono, AG. 2005. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitia Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung:Alfabeta.

Suratman, 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Capiya Publishing

Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Undip. Semarang. GrafindoPersada. Jakarta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Lukman. Offside YPAPI

Thoha, Miftah. 2011. *Ilmu Administrasi Publik dan Kontemporer*. Jakarta: Kencana

Wahab , Solichim Abdul, 2010. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, budi. 2012. *Kebijakan Publik, Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta:CAPS

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015

Peraturan bupati kabupaten soppeng nomor 23 tahun 2016

Keputusan bupati kabupaten soppeng nomor 364/ IV/ 2018

<https://soppengkab.go.id>. Diakses Tanggal 27 juli 2018 pukul 22.00

makassar.tribunnews.com. Diakses tanggal 27 juli pukul 22.05

www.bugiswarta.com > Berita > Daerah diakses tanggal 27 juli pukul 23.00

INSTRUMEN PENELITIAN

1. Pedoman Wawancara dengan pelaksana program Kartu Macca

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Komunikasi	<p>) Dalam implementasi program Kartu Macca, apakah Pemerintah Kabupaten Soppeng melakukan sosialisasi terkait program kartu macca?</p> <p>) Berapa kali sosialisasi terkait program kartu macca dilakukan?</p> <p>) Siapa saja yang berperan dalam implementasi program kartu macca?</p> <p>) Bagaimana kejelasan informasi terkait program kartu macca?</p>
2	Sumber Daya	<p>) Siapakah implementor program kartu macca ini?</p> <p>) Apakah staf/ implementor program kartu macca sudah cukup?</p> <p>) Darimana sumber dana untuk melaksanakan program kartu macca ini?</p> <p>) Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?</p> <p>) Berapa anggaran yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam implementasi program kartu macca ini?</p> <p>) Apakah anggaran yang disediakan sudah cukup?</p>
3	Disposisi	<p>) Bagaimana pemahaman implementor terhadap program kartu macca tersebut?</p> <p>) Bagaimana respon implementor dalam program kartu macca ini?</p> <p>) Apakah implementor yang terkait</p>

		<p>mendukung program pemerintah tersebut?</p> <p>) Apakah implementor sudah menjalankan tuposinya sesuai dengan peraturan yang ada mengenai program kartu macca ?</p>
4	Struktur Birokrasi	<p>) Bagaimana mekanisme prosedur dalam pelaksanaan program kartu macca ini?</p> <p>) Apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Perbup Nomor 23 Tahun 2016?</p>

2. Pedoman Wawancara dengan masyarakat Kabupaten Soppeng

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN
1	Komunikasi	<p>) Bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng terhadap pelaksanaan program kartu macca?</p> <p>) Apakah anda sebagai masyarakat kabupaten soppeng mengetahui tentang program kartu macca ini?</p> <p>) Bagaimana pendapat anda tentang program yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten Soppeng?</p>
2	Sumber Daya	<p>) Dalam pelaksanaan peogram kartu macca ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng?</p> <p>) Apa manfaat yang diperoleh dari program kartu macca ini?</p> <p>) Apa yang anda harapkan dari program kartu macca ini?</p>

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Kepala Bidang Hukum Sekretaris Kabupaten Soppeng



Wawancara dengan Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan



Wawancara dengan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan Masyarakat



Wawancara dengan masyarakat



Kartu Macca



RIWAYAT HIDUP



IRMA PUTRI SURIADI. Lahir di Turlappae Taanggal 23 Mei 1996, anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda SURIADI dengan Ibunda JUMRIANI. Penulis memulai pendidikan pada tahun 2001 di TK Tunas Harapan kemudian lulus pada tahun 2002. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah SD Negeri 40 Paddangeng dan lulus pada tahun 2008. Kemudian penulis melanjutkan sekolah SMP Negeri 1 Donri-donri ditahun 2008 dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan lagi di SMA Negeri 1 Donri-donri lulus pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi, tepatnya di Universitas Muhamadiyah Makassar pada jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik strata 1 (S1). Selama mengenyam pendidikan di Unismuh penulis juga aktif dalam kepengurusan CESIST, yang mana merupakan Badan Semi Otonom himpunan Mahasiswa Administrasi Negara Fisip Unismuh periode 2016-2017 serta pada kepengurusan 2017-2018 penulis diangkat sebagai Director III CESIST.